

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU





Peta Pembinaan Provinsi Kepulauan Riau

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-9-4

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Laili Isna Nur Khiqmah, S.Si.
2. Maria Herlina, M.Si.
3. Garsy Marsada Marudut H. Simorangkir, SH

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BINTAN	4
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	4
Aspek Satuan Inovasi Daerah	5
B. KABUPATEN KARIMUN	11
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	11
Aspek Satuan Inovasi Daerah	12
C. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	18
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	19
Aspek Satuan Inovasi Daerah	20
D. KABUPATEN LINGGA	26
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	27
Aspek Satuan Inovasi Daerah	27
E. KABUPATEN NATUNA	31
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	31
Aspek Satuan Inovasi Daerah	32
F. KABUPATEN BATAM	38
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	40
G. KABUPATEN TANJUNG PINANG	47
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	47
Aspek Satuan Inovasi Daerah	48

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI	55
---	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bintan
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bintan
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Bintan
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Bintan
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bintan
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Bintan
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Bintan
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Karimun
- Gambar 13. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Karimun
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Karimun
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Karimun
- Gambar 16. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Karimun
- Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Karimun
- Gambar 18. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karimun
- Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Karimun
- Gambar 20. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun
- Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 22. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 33. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lingga

Gambar 34. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lingga

Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Lingga

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Lingga

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Lingga

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Lingga

Gambar 39. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lingga

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Lingga

Gambar 41. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lingga

Gambar 42. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna

Gambar 43. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Natuna

Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Natuna

Gambar 45. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Natuna

Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Natuna

Gambar 47. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Natuna

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Natuna

Gambar 49. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna

Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Natuna

Gambar 51. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna

Gambar 52. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 53. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Batam

Gambar 54. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batam

Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Batam

Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Batam

Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Batam

Gambar 58. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Batam

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Batam

Gambar 60. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Batam

Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Batam

Gambar 62. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Batam

Gambar 63. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 64. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 65. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 67. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 69. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tanjung Pinang

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 71. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Tanjung Pinang

Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tanjung Pinang

Gambar 73. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tanjung Pinang

Gambar 74. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Inovasi Kabupaten Bintan beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Karimun beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Lingga beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Natuna beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Bintan beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kota Tanjung Pinang beserta Skor Kematangannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. penyelenggaraan Inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui: peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian Inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, Penilaian Inovasi Daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam, dari tahun - tahun sebelumnya yaitu: Pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 Pemda dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 Pemda dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 Pemda dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*), dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan menyinergikan antara

kepemimpinan, sumberdaya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah kearah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah Daerah perlu berstrategi secara cermat agar Inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah Daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan Kepada Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan Pemerintah Daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupunkementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

Informasi capaian kinerja inovasi di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah maupun Aspek Satuan

Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek pertama adalah Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) yang memuat 3 variabel yaitu variabel institusi, variabel sumberdaya manusia dan jumlah inovasi, variabel ekosistem inovasi dan kajian. SID terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator output dan outcome Aspek kedua ialah aspek Satuan Inovasi Daerah (SID) yang terdiri dari 5 variabel yaitu variabel infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah.

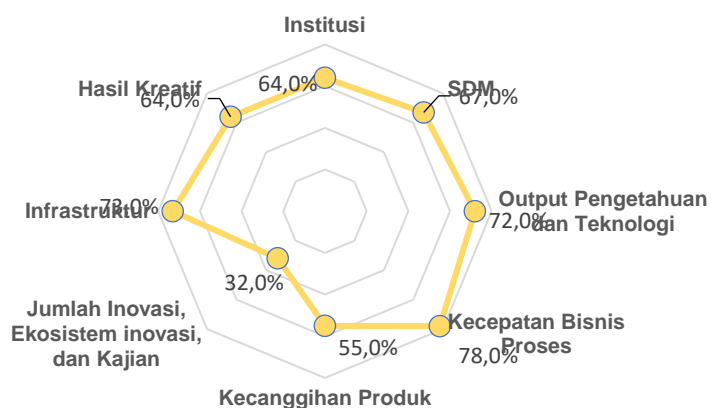
The Page Left Is bLank



BAB II

**INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA**

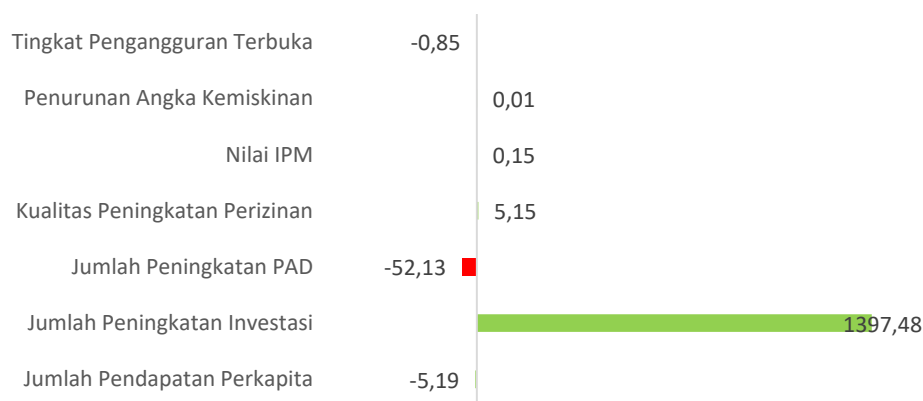
A. KABUPATEN BINTAN



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bintan memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses sebesar 78.0% artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut telah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Tetapi pada skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yaitu sebesar 32.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah dengan sebagian besar berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bintan

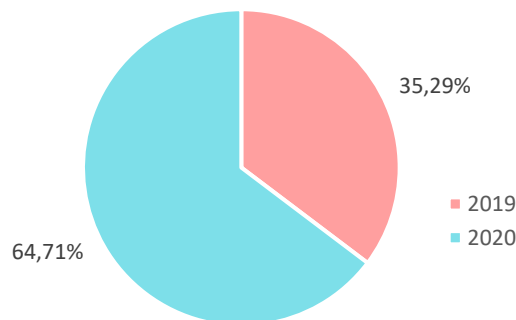
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terdapat penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.85%, artinya jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Bintan pada tahun 2020 meningkatkan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.01%. Dilihat dari indikator Nilai IPM, terdapat kenaikan sebesar 0.15% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah dimana tidak ada perubahan nilai IPM.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten Bintan meningkat sebesar 5.15%, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2020 menurun sebesar 52.13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi, Kabupaten Bintan mengalami peningkatan jumlah investasi 1397.48% dimana lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Bintan menurun sebesar 5.19%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

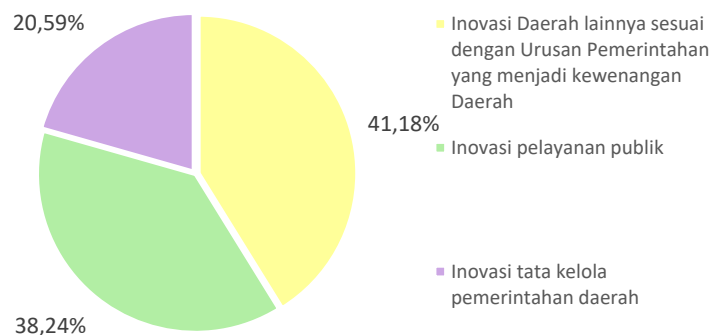
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bintan

Berdasarkan tahun penerapannya, sebagian besar inovasi yang dilaporkan Kabupaten Bintan mulai diterapkan tahun 2020 dengan jumlah 22 inovasi (64.71%), terdapat 12 inovasi (35.29%) yang telah diterapkan sejak tahun 2019.

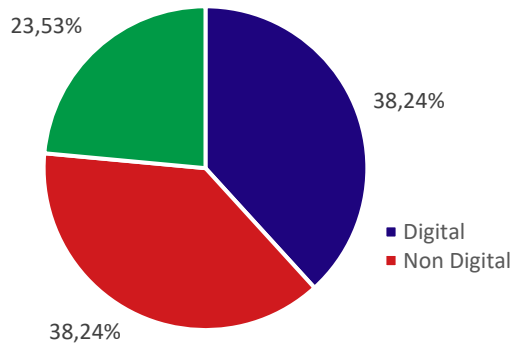
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Bintan

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah Kabupaten Bintan sebagian besar berbentuk inovasi daerah lainnya dengan jumlah 14 inovasi (41.18%), sebagian lainnya merupakan inovasi pelayanan publik sebanyak 13 inovasi (38.24%) dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 7 inovasi (20.59%).

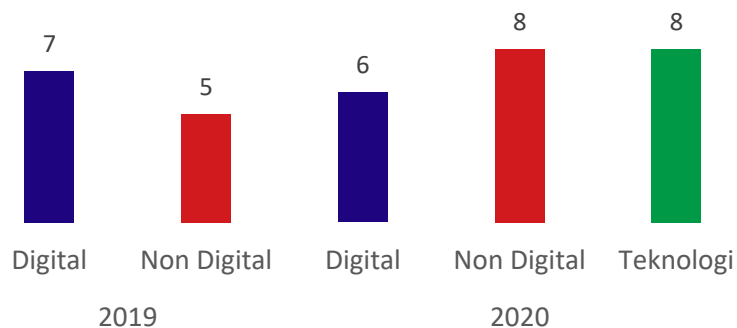
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Bintan

Berdasarkan jenis inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kabupaten Bintan merupakan inovasi digital dan non digital dengan masing – masing berjumlah 13 inovasi (38.24%), terdapat 8 inovasi (23.53%) berbentuk teknologi.

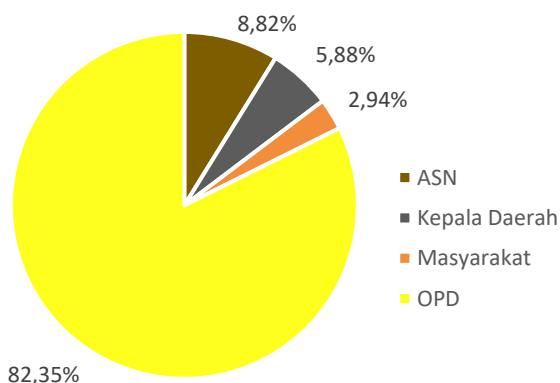
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bintan

Berdasarkan tahun penerapan dan jenis inovasi, terdapat kenaikan pada jenis inovasi non digital dari 5 inovasi pada tahun 2019 menjadi 8 inovasi pada tahun 2020, sedangkan jenis inovasi digital mengalami penurunan jumlah inovasi dari 7 inovasi pada tahun 2019 menjadi 6 inovasi di tahun 2020. Pada jenis inovasi teknologi hanya terdapat pada tahun 2020 berjumlah 8 inovasi.

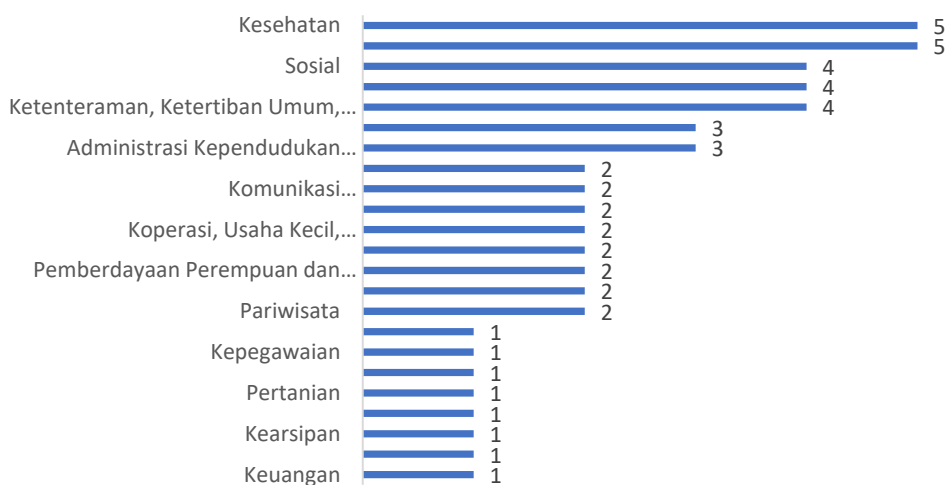
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Bintan

Berdasarkan kategori inisiator, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bintan berasal dari inisiasi OPD sebanyak 28 inovasi (82.35%), selain itu terdapat 3 inovasi (8.82%) di inisiasi oleh ASN, 2 inovasi (5.88%) di inisiasi oleh Kepala Daerah, dan 1 inovasi (2.94%) diinisiasi oleh masyarakat.

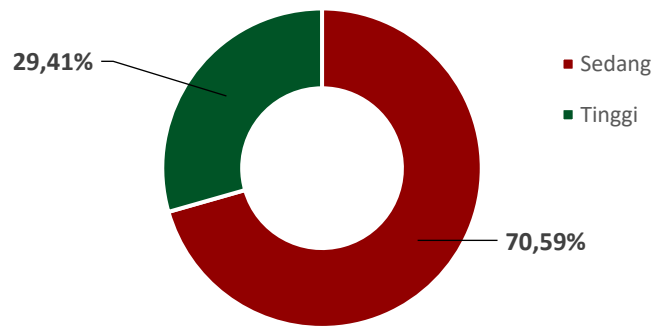
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kesehatan merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak sejumlah 5 inovasi. Selain itu terdapat inovasi dari urusan wajib pelayanan dasar seperti Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sosial (4 inovasi), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 2 inovasi.

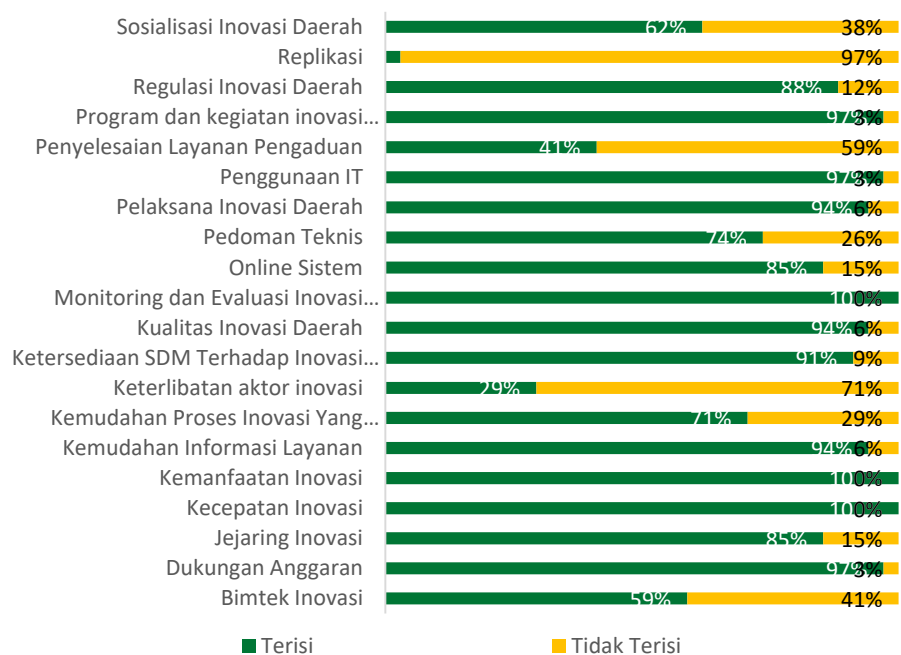
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Bintang

Berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebagian besar inovasi Kabupaten Bintang mencapai skor kematangan sedang sebanyak 24 inovasi (70.59%), selain itu terdapat 10 inovasi (30.00%) yang sudah mencapai skor kematangan tinggi.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

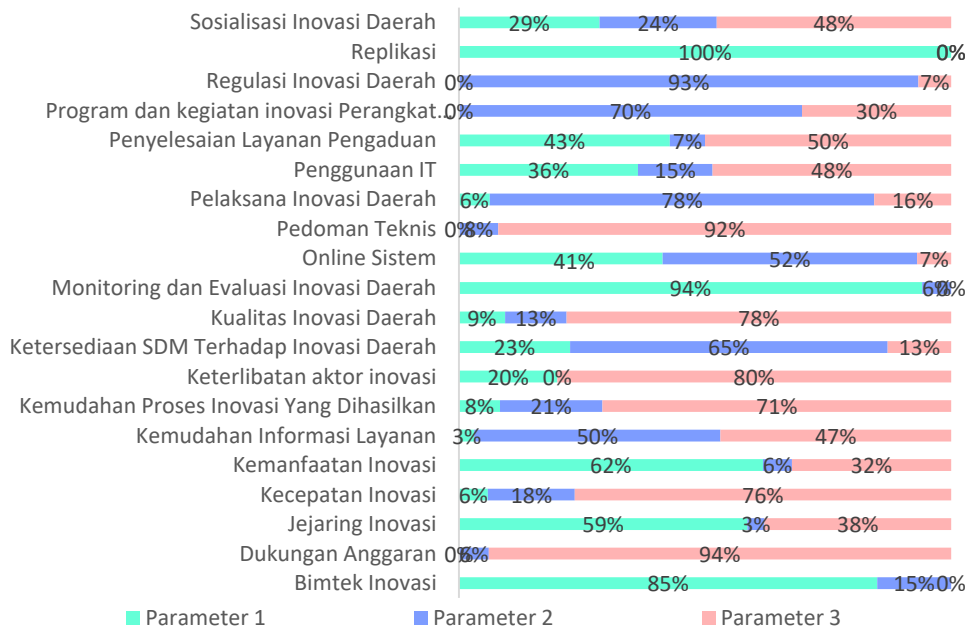


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata – rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi sebesar 78.09%, artinya dari 20 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Bintang sebagian besar setiap inovasi telah terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kecepatan Inovasi, dan Kemanfaatan Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100%, artinya dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bintan telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 3% artinya dari semua inovasi yang dilaporkan terdapat 1 inovasi dari 34 inovasi terdapat data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Dukungan Anggaran. Pada indikator tersebut, 94% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Bintan telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3.

Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Regulasi Inovasi Daerah sebesar 93% artinya dari seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung, 93% termasuk dalam kategori parameter 2.

Pada indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung hanya memenuhi parameter pertama dalam indikator tersebut.

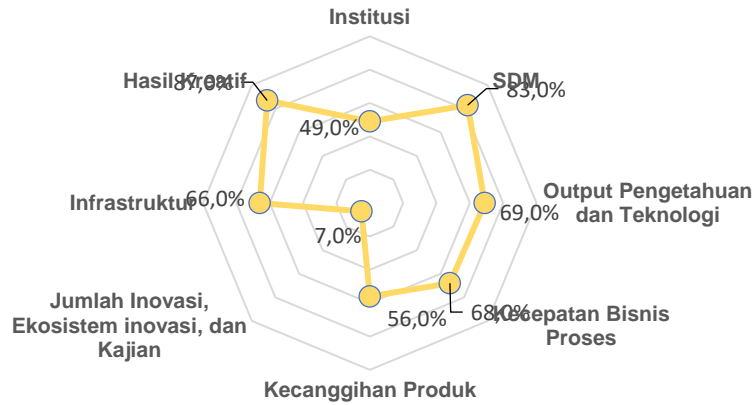
j. Daftar Inovasi Kabupaten Bintang beserta Skor Kematangannya

Tabel 1. Daftar Inovasi Kabupaten Bintang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)	113
Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)	113
LokMed (Loker Berbasis Medsos)	109
Kampung Ayam Berbasis Kepulauan	106
Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)	103
Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)	103
FAST SI BAJA (FASILITASI PENGENTRIAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN BINTAN)	102
SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)	100
SI PANDU CAPIL (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)	100
KAKEKKU DATANG - KARTU KELUARGA KU DATA ULANG	100
Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)	99
SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintang)	98
E - PUSKESMAS	97
Delima (Database Penelitian kelitbang)	96
TANGGAP JIWA	94
E-RAPAT	93
Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintang	92
Fatoni (Fasilitasi Inovasi)	92
Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)	90
Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)	89
Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintang	88
Klinik Konsultasi (Layanan konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintang)	86
Secanting Beras	85
Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)	82
Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah	82
Air Mancur Tasek Tuah Gemilang	80
E - Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintang)	79
Hidroponik Masuk Desa	79
Kampung Otak-Otak	77
Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintang)	76
SY KEMAS (system Kepuasan Masyarakat)	74
Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)	70
Perahu Gemilang	69

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Standby QR Code	68

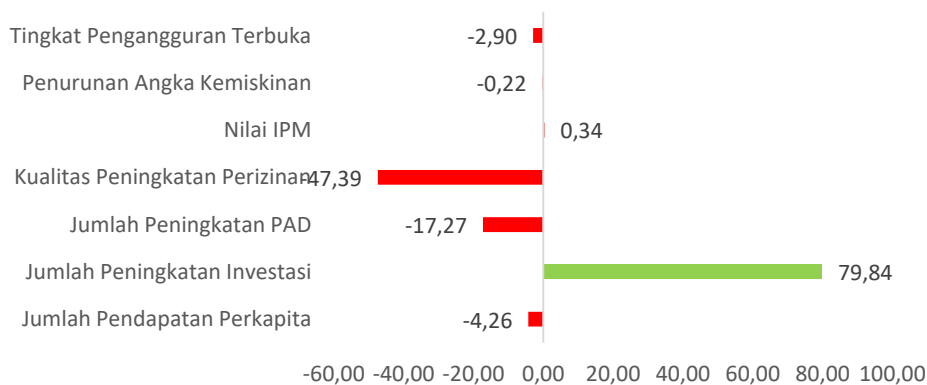
B. KABUPATEN KARIMUN



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Karimun memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif sebesar 87.0% artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut telah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Tetapi pada skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yaitu sebesar 7.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah dengan sebagian besar berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 12. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Karimun

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terdapat penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -2.90%,

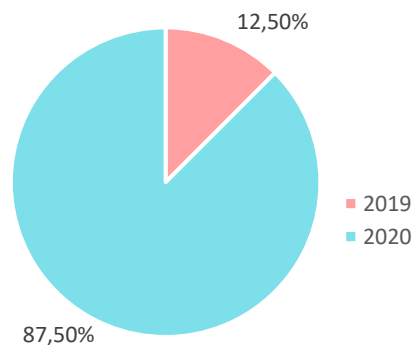
artinya jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Karimun pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.22%, angka ini lebih rendah dari standar parameter indeks yaitu penurunan sebesar 0.02%. Sedangkan dari indikator Nilai IPM, terdapat kenaikan sebesar 0.34% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah dimana tidak ada perubahan nilai IPM.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten Karimun menurun sebesar 47.39% dari tahun sebelumnya, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kabupaten Karimun pada tahun 2020 menurun sebesar 17.27% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi, Kabupaten Karimun mengalami peningkatan jumlah investasi 79.84% dimana lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Karimun menurun sebesar 4.26% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih rendah dari standar parameter indeks yaitu minimal penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

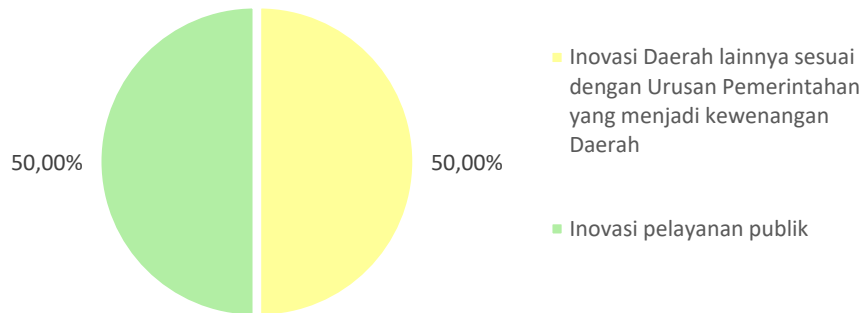
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 13. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Karimun

Berdasarkan tahun penerapannya, sebagian besar inovasi yang dilaporkan Kabupaten Karimun mulai diterapkan tahun 2020 dengan jumlah 7 inovasi (87.50%), terdapat 1 inovasi (12.50%) yang telah diterapkan sejak tahun 2019.

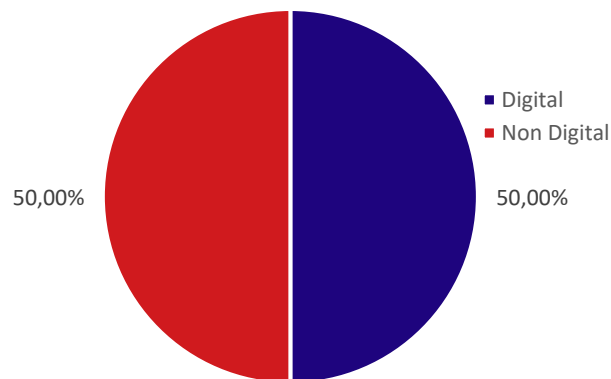
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Karimun

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah Kabupaten Karimun terdiri dari inovasi berbentuk inovasi daerah lainnya dan inovasi pelayanan publik, masing – masing berjumlah 4 inovasi.

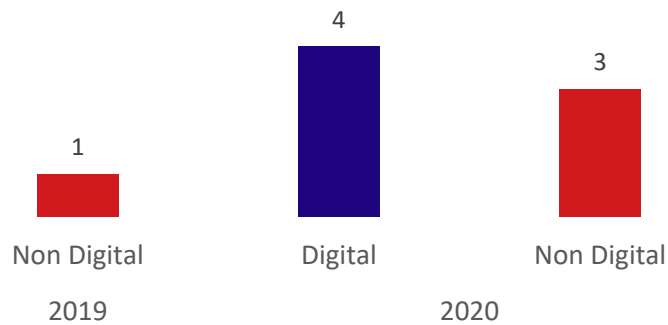
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Karimun

Dilihat dari jenis inovasi, masing – masing inovasi digital dan non digital berjumlah 4 inovasi.

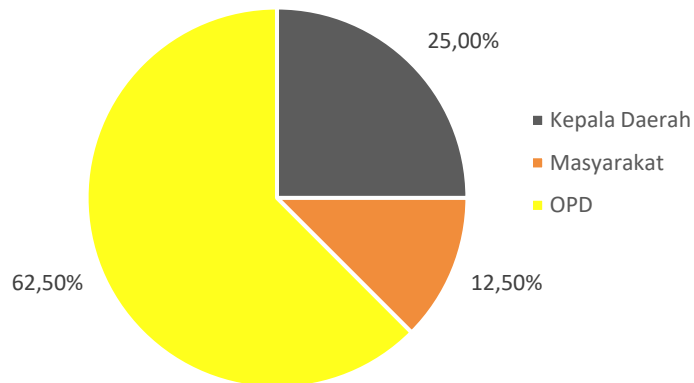
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 16. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Karimun

Berdasarkan tahun penerapan dan jenis inovasi, terdapat kenaikan pada jenis inovasi non digital dari 1 inovasi pada tahun 2019 menjadi 3 inovasi pada tahun 2020, sedangkan jenis inovasi digital hanya terdapat pada tahun 2020 berjumlah 4 inovasi.

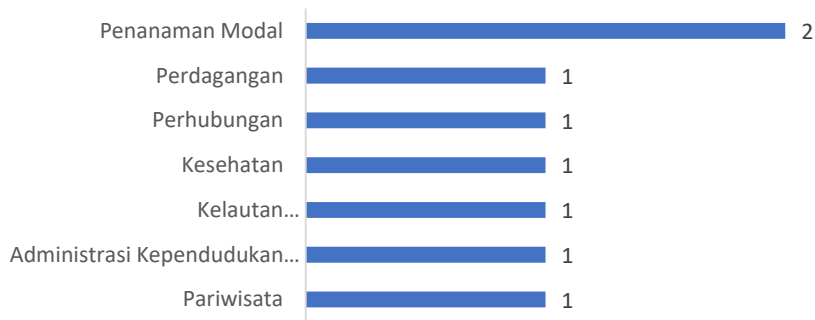
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Karimun

Berdasarkan kategori inisiator, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karimun berasal dari inisiasi OPD sebanyak 5 inovasi (62.50%), selain itu terdapat 2 inovasi (25.00%) di inisiasi oleh Kepala Daerah dan 1 inovasi (12.50%) diinisiasi oleh masyarakat.

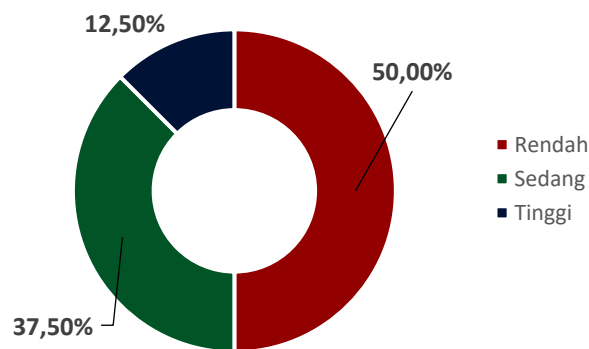
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 18. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karimun

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi dari urusan Penanaman Modal merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak sejumlah 2 inovasi. Selain itu terdapat inovasi dari urusan wajib pelayanan dasar yaitu Kesehatan berjumlah 1 inovasi.

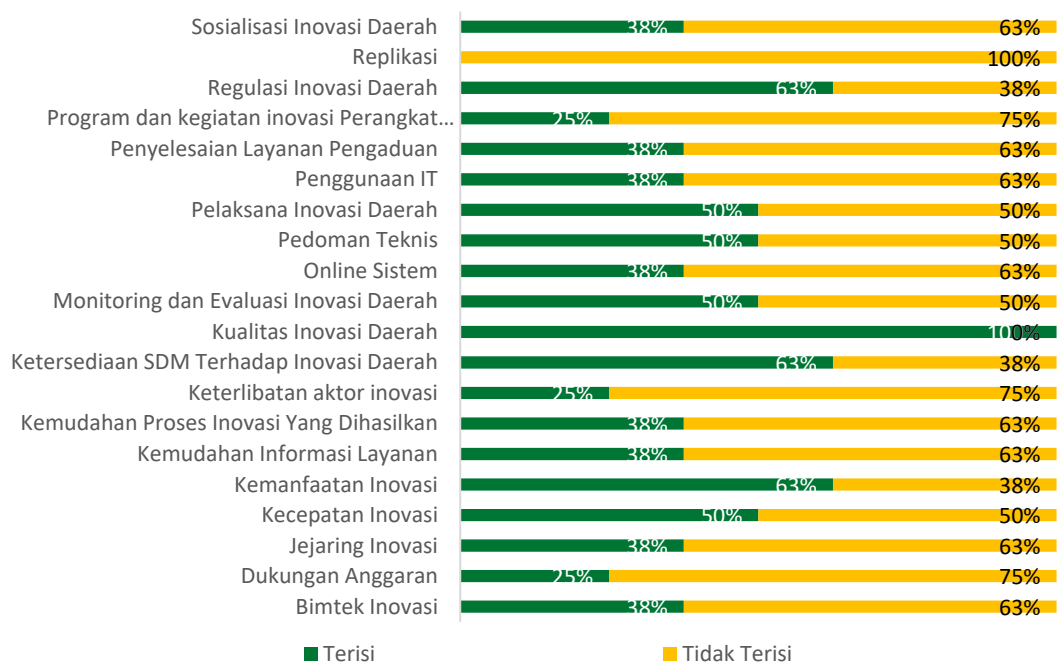
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Karimun

Berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebagian besar inovasi Kabupaten Karimun mencapai skor kematangan rendah sebanyak 4 inovasi (50.00%), selain itu terdapat 3 inovasi (30.00%) mencapai skor kematangan rendah dan 1 (12.50%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

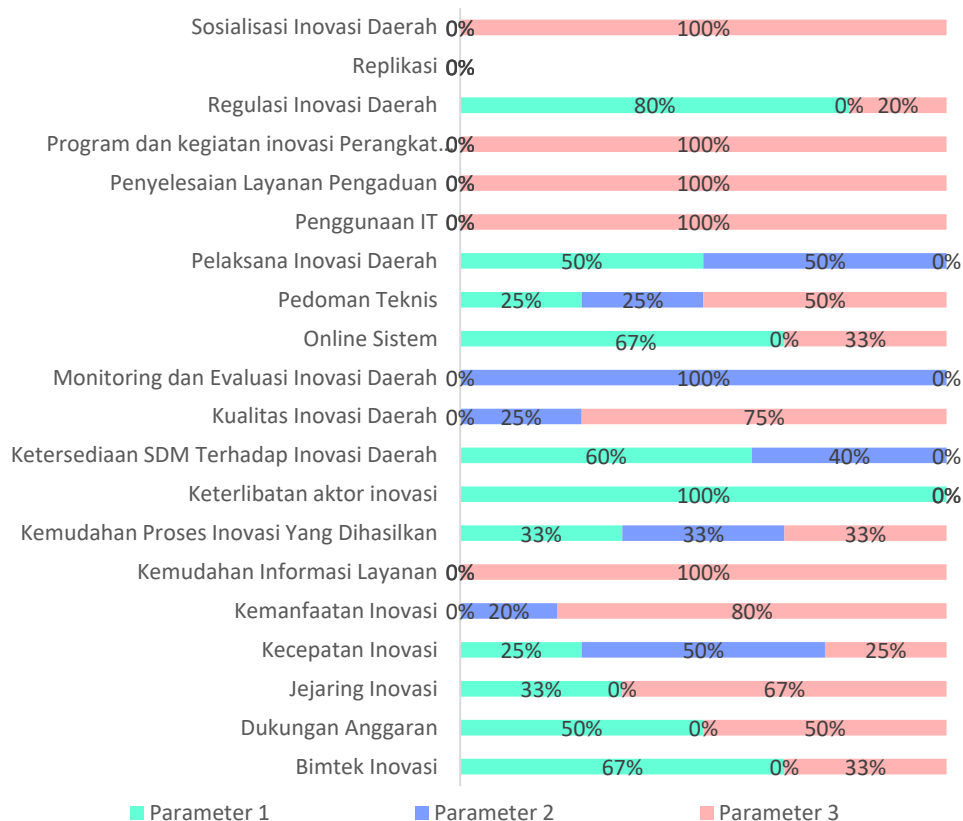


Gambar 20. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata – rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi sebesar 43.13%, artinya dari 8 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Karimun sebagian besar setiap inovasi telah terisi data pendukung sejumlah 9 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100%, artinya dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karimun telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 0% artinya dari semua inovasi yang dilaporkan, tidak terdapat terdapat data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Program kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, dan Kemudahan Informasi Layanan. Pada indikator tersebut, 100% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Karimun telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3.

Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya dari seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung, seluruhnya termasuk dalam kategori parameter 2.

Pada indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan aktor inovasi sebesar 100%, seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung hanya memenuhi parameter pertama dalam indikator tersebut.

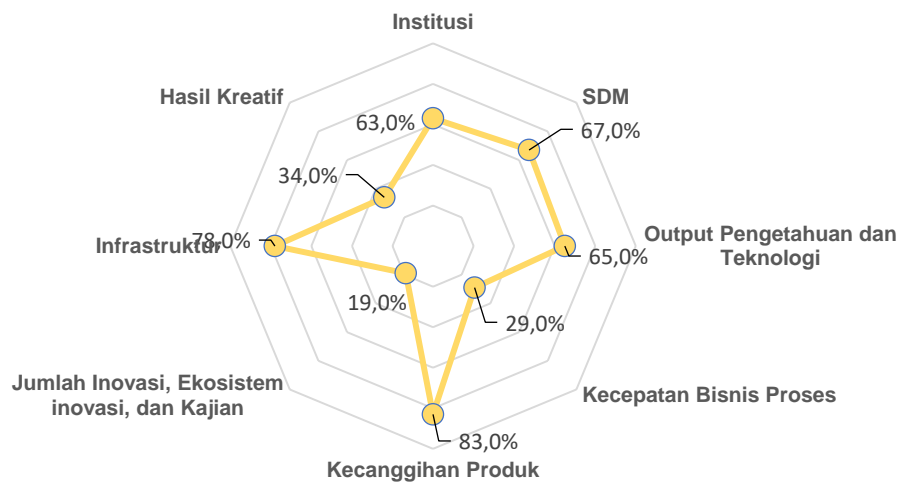
j. Daftar Inovasi Kabupaten Karimun beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Karimun beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Ayo Realisasikan Administrasi Harmonisasi Perikanan (ARAH_KAN)	119
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor PTSP	92

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Perizinan Antar Jemput Pulau, Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik di masa Pandemi (Pantau Sicantik Mami)	67
Paling Cepat (Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling Cetak di Tempat)	59
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Transportasi Umum	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Hotel	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid Pada Sektor Pasar Modern/Mal	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Pasar Tradisional	15

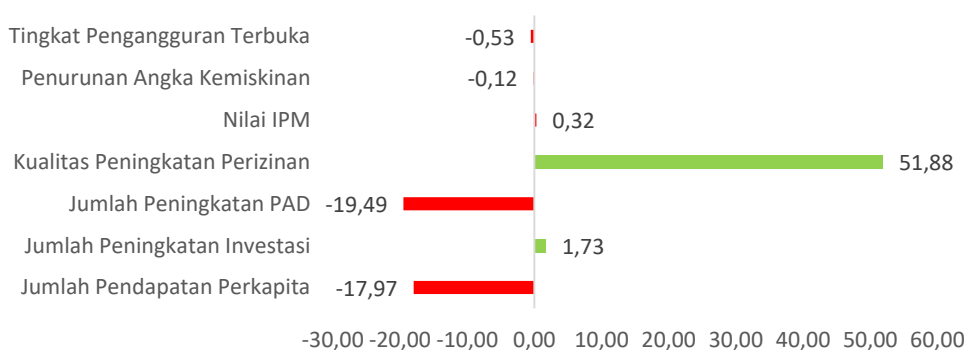
C. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Gambar 22. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk sebesar 83.0% artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut telah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Tetapi pada skor variabel Kecepatan Bisnis Proses masih rendah, yaitu sebesar 29.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah dengan sebagian besar berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Anambas

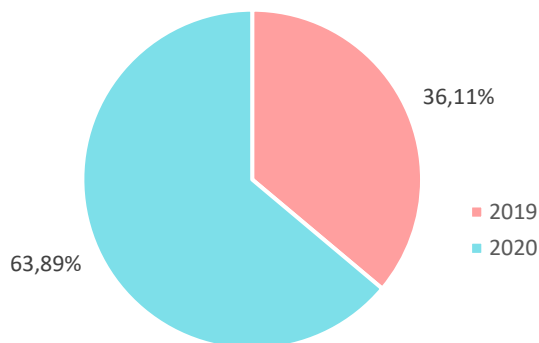
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai nilai sebesar -0.53%, artinya jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.12%, angka ini lebih rendah dari standar parameter indeks yaitu penurunan sebesar 0.02%. Sedangkan dari indikator Nilai IPM, terdapat kenaikan sebesar 0.32% dari tahun sebelumnya.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat sebesar 51.88% dari tahun sebelumnya, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 menurun sebesar 19.49% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi, Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan jumlah investasi 1.73% dimana lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas menurun sebesar 17.97% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dari standar parameter indeks yaitu minimal penurunan sebesar 1.85%.

1. Aspek Satuan Inovasi Daerah

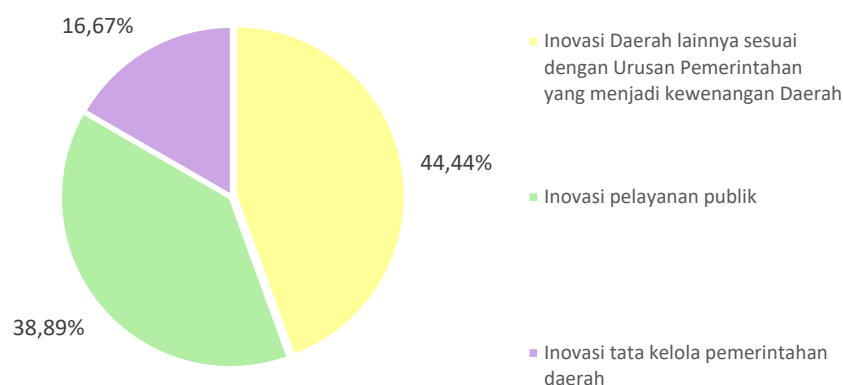
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan tahun penerapannya, sebagian besar inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kepulauan Anambas mulai diterapkan tahun 2020 dengan jumlah 23 inovasi (63.89%), terdapat 13 inovasi (36.11%) yang telah diterapkan sejak tahun 2019.

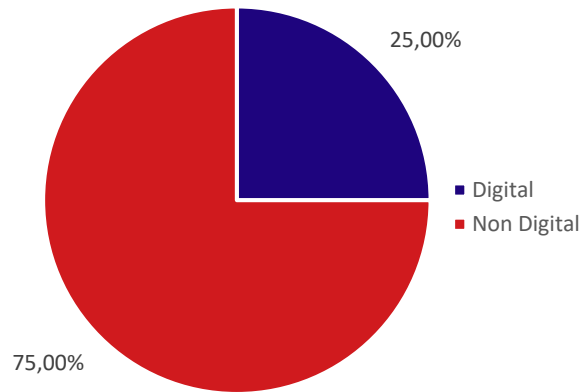
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari inovasi berbentuk inovasi daerah lainnya dengan jumlah 16 inovasi (44.44%), sebagian lainnya merupakan inovasi berbentuk inovasi pelayanan publik sebanyak 14 inovasi (38.89%), dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 6 inovasi (16.67%).

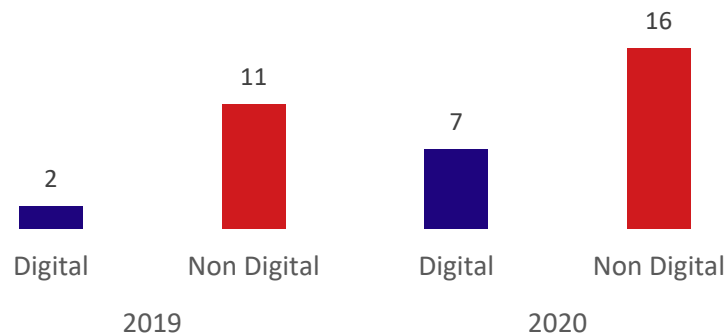
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Dilihat dari jenis inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan inovasi non digital sebanyak 27 inovasi (75.00%), sedangkan terdapat 9 inovasi (25.00%) berbentuk digital.

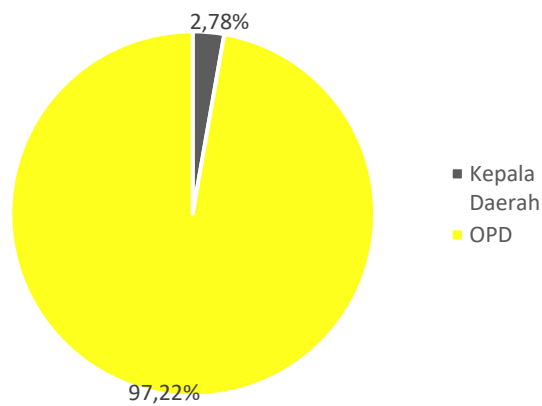
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan tahun penerapan dan jenis inovasi, terdapat kenaikan pada jenis inovasi non digital dan digital, pada inovasi non digital terdapat kenaikan dari 11 inovasi pada tahun 2019 menjadi 16 inovasi pada tahun 2020, sedangkan jenis inovasi digital terdapat kenaikan dari 2 inovasi pada tahun 2019 menjadi 7 inovasi pada tahun 2020.

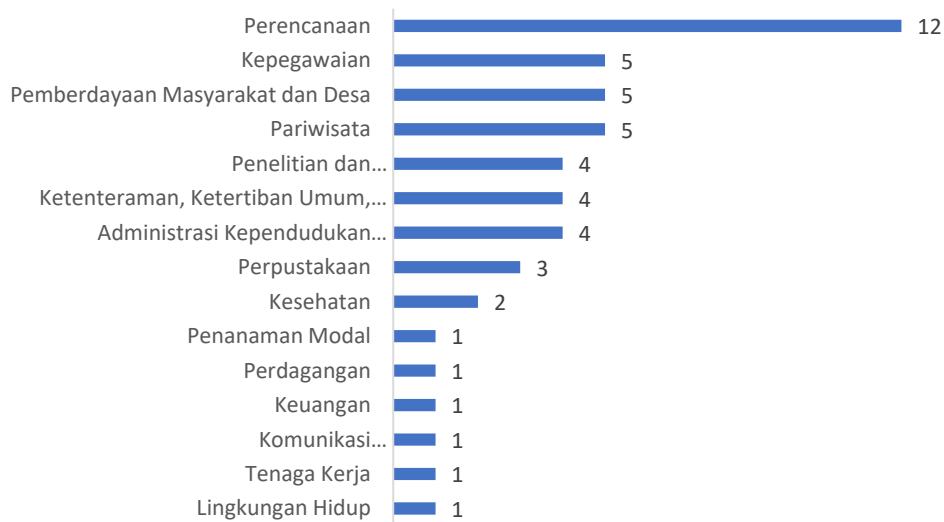
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan kategori inisiator, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari inisiasi OPD sebanyak 35 inovasi (97.22%), selain itu terdapat 1 inovasi (2.78%) di inisiasi oleh Kepala Daerah.

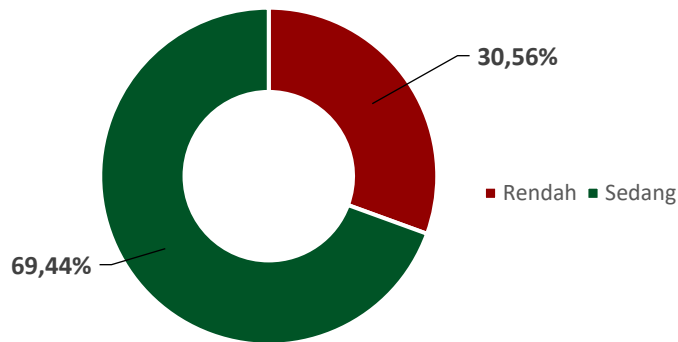
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi dari urusan Perencanaan merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak sejumlah 12 inovasi. Selain itu terdapat inovasi dari urusan wajib pelayanan dasar yaitu Kesehatan berjumlah 2 inovasi.

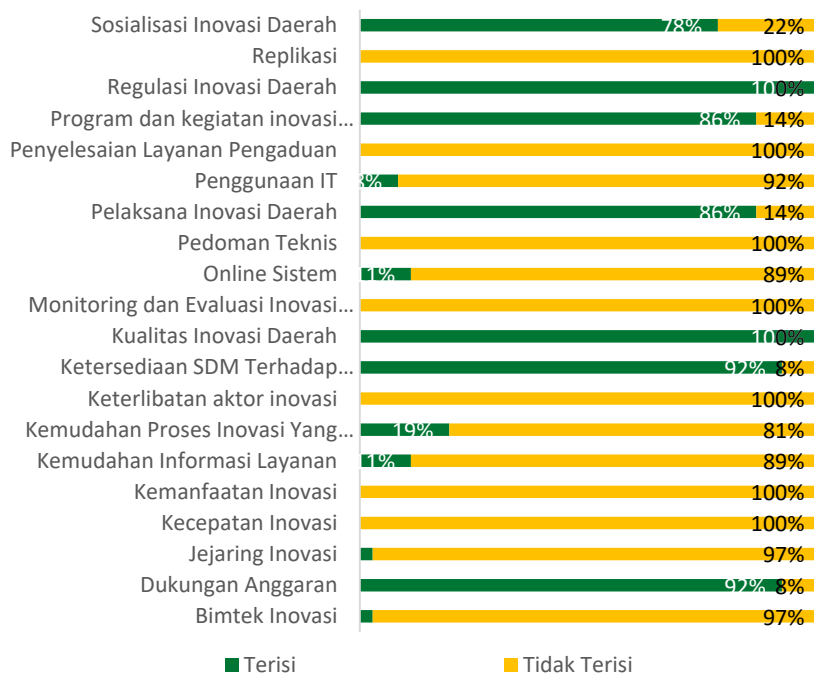
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebagian besar inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai skor kematangan sedang sebanyak 25 inovasi (69.44%), selain itu terdapat 11 inovasi (30.56%) mencapai skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



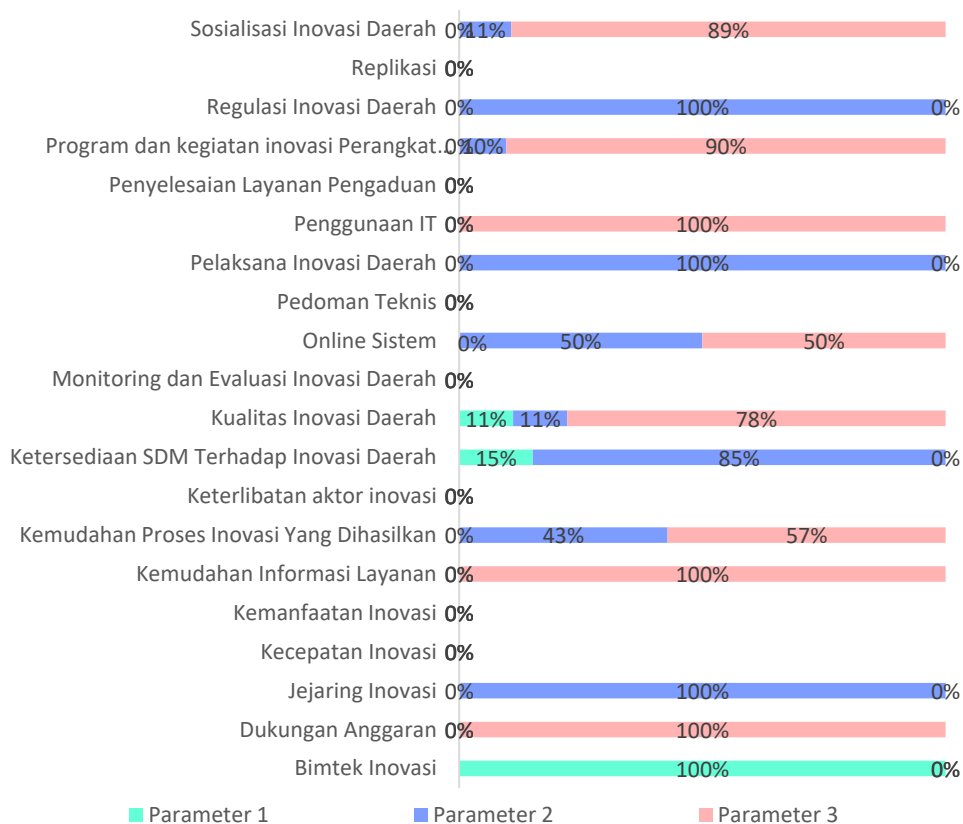
Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata – rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi sebesar 34.44%, artinya dari

36 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar setiap inovasi telah terisi data pendukung sejumlah 7 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100%, artinya dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan terdapat 7 indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung sebesar 0% artinya dari semua inovasi yang dilaporkan, tidak terdapat terdapat data pendukung dari indikator tersebut, yaitu indikator Kecepatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Keterlibatan aktor inovasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Dukungan Anggaran, Kemudahan Informasi Layanan, dan Penggunaan IT. Pada indikator tersebut, 100% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kepulauan Anambas telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3.

Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Jejaring Inovasi, Pelaksana Inovasi Daerah, dan Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya dari

seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung, seluruhnya termasuk dalam kategori parameter 2.

Pada indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 100%, seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung hanya memenuhi parameter pertama dalam indikator tersebut.

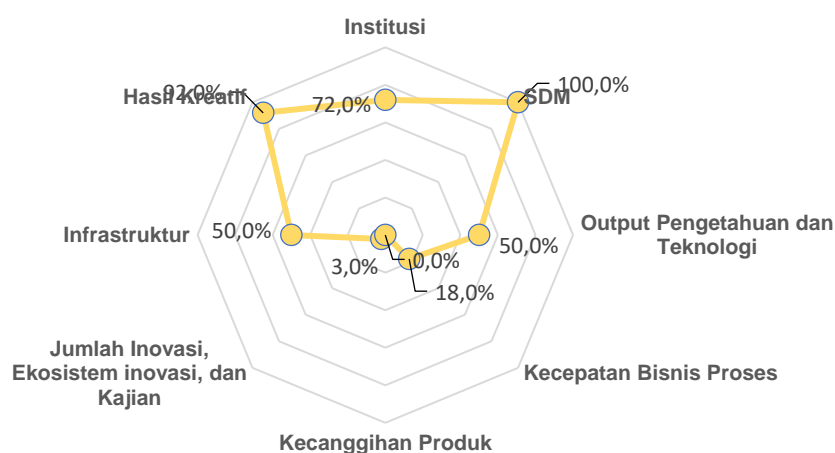
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Kepulauan Anambas beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Anambas (AMELIA REBANA)	61
Sistem Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Elektronik (ASIS e-Kepegawaian)	61
Pengumpulan Data Sistem Aplikasi KKS (PEMDA SIAP)	61
INOVASI TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERBASIS KINERJA (ASIS e-KINERJA)	61
Teller.ID	59
Komunitas Jaga Kampung (KJK)	55
MUSRENBANG TEMATIK (MUSRENTIK)	55
Monev Partisipatif bersama Komunitas Photography Lokal (MARKOPOLO)	55
Asuransi Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal Masyarakat (ASKA PAK MAT)	55
Bulan Darma dan Tali Asih (BUDARSIH)	55
SABER (SABTU BERSIH)	55
RAM KECAP (Pagu Musrenbang Per Kecamatan)	55
Inovasi Peningkatan Penerima Layanan Perpustakaan Daerah Kab. Kep. Anambas (BINTANG KUNJUNGAN)	53
POJOK DATA	53
Internet Sehat Aman Tingkatkan Kualitas Literasi (Insan Teliti)	53
Bersama Pantau Pelaksanaan Program, Dana, Organisasi, dan Kepegawaian (BAPPEDA OKE)	53
Bimbingan Mental (BINTAL)	53
Jumat Hapalan dapat Hadiah (JUALAN HADIAH)	53
KASEH (KAMI SEHAT)	53
Desa Wisata Pulau Pangeran (Desa Belibak)	51
Hantar Dokumen Sampai ke Alamat (HANG JEBAT)	51
KK, Akta Kelahiran dan KIA Seketika (KATA KITA)	51
Jemput Dokumen KIA dan AKTA (JEMPOL KITA)	51
Festival Padang Melayang (Helat Budaya Melayu Pesisir)	50
Desa Batu Belah (Desa Wisata dan Eonomi Kreatif)	50
Tajaan Jari-jari Kreatif atas Hasil-hasil Pembangunan dalam Narasi Audio-Imaging (Tanjak Hang Nadim)	49
CAFE KEJUJURAN	49

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
JUM'AT KELILING GUNA PENINGKATAN SENSIVITAS DAN OBJEKTIVITAS PERENCANAAN (JELING PESONA)	49
FESTIVAL JONGKONG LAYAR	48
Riviu Rabu Buat Rencana Cerdas (Ibu Buras)	47
Rekam KTP-el dan Cetak Ditempat (REM CEPAT)	46
Gerakan Peduli Cegah Stunting (GARPU GENTING)	42
Aspirasi Masyarakat, Sehat, Bersih, Indah (ASMARA SEHATI)	40
Let's Explore Anambas New Normal Tourism Experiences	33
PTSP Melayani, Sehat dan Bebas Covid-19	29
Pelaksanaan New Normal Pasar Tradisional di Kabupaten Kepulauan Anambas	29

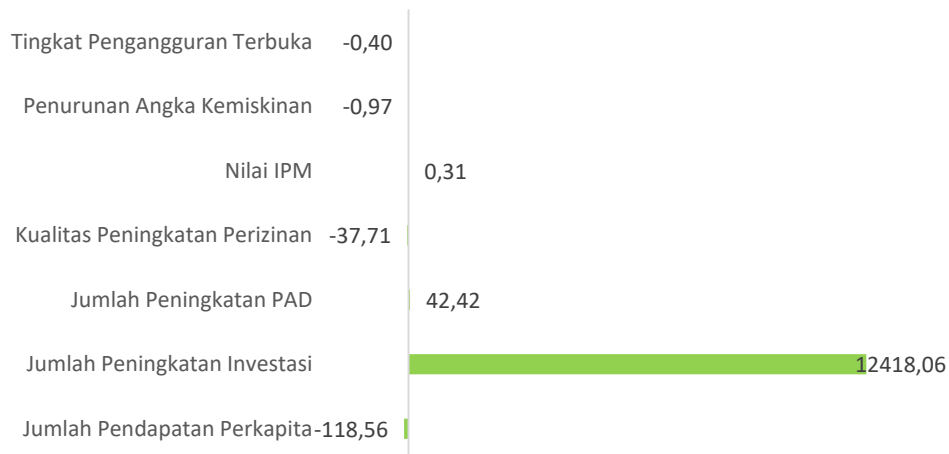
D. KABUPATEN LINGGA



Gambar 33. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lingga

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lingga memiliki skor tertinggi pada variabel SDM sebesar 100.0% artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut telah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Tetapi pada skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu sebesar 0% dimana secara umum indikator – indikator pada variabel tersebut belum dilengkapi oleh data dukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



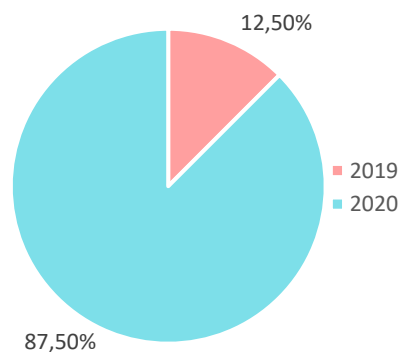
Gambar 34. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lingga

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai nilai -0.85%, artinya jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Lingga pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.97%, angka ini lebih rendah dari standar parameter indeks yaitu penurunan sebesar 0.02%. Sedangkan dari indikator Nilai IPM, terdapat kenaikan sebesar 0.31% dari tahun sebelumnya.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten Lingga menurun sebesar 37.71% dari tahun sebelumnya, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kabupaten Lingga pada tahun 2020 meningkat sebesar 42.42% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Lingga menurun sebesar 118.56% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dari standar parameter indeks yaitu minimal penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

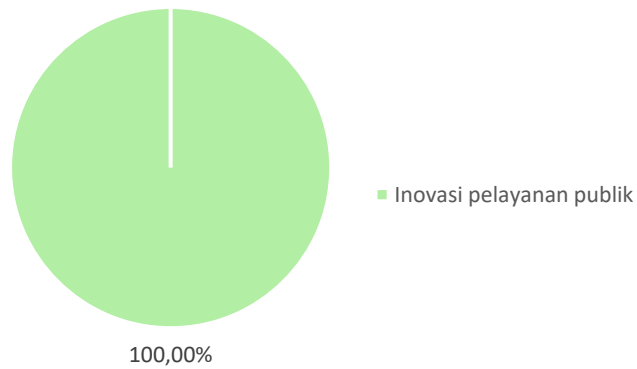
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Lingga

Berdasarkan tahun penerapannya, sebagian besar inovasi yang dilaporkan Kabupaten Lingga mulai diterapkan tahun 2020 dengan jumlah 7 inovasi (87.50%), terdapat 1 inovasi (12.50%) yang telah diterapkan sejak tahun 2019.

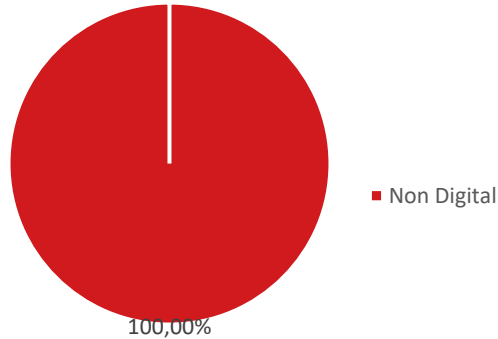
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Lingga

Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh inovasi daerah Kabupaten Lingga merupakan inovasi pelayanan publik sebanyak 8 inovasi.

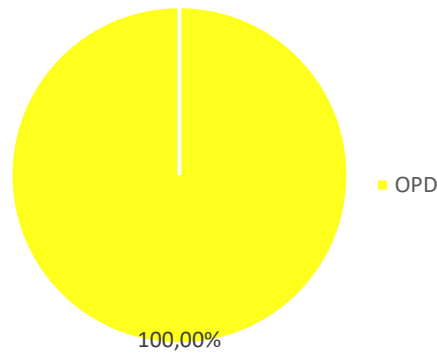
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Lingga

Dilihat dari jenis inovasi, seluruh inovasi daerah Kabupaten Lingga merupakan inovasi non digital sebanyak 8 inovasi (100.00%).

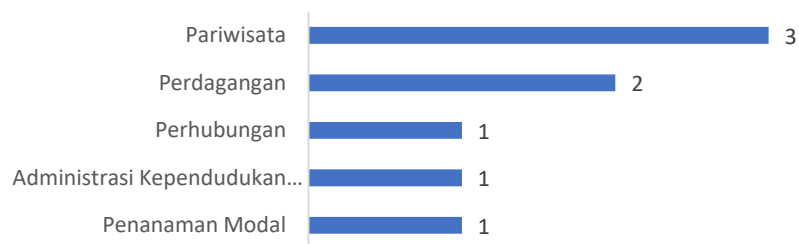
d. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Lingga

Berdasarkan kategori inisiator, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lingga berasal dari inisiasi OPD sebanyak 8 inovasi (100.00%).

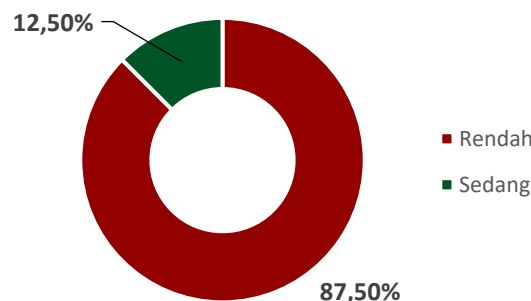
e. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 39. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lingga

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi dari urusan Pariwisata merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak sejumlah 3 inovasi.

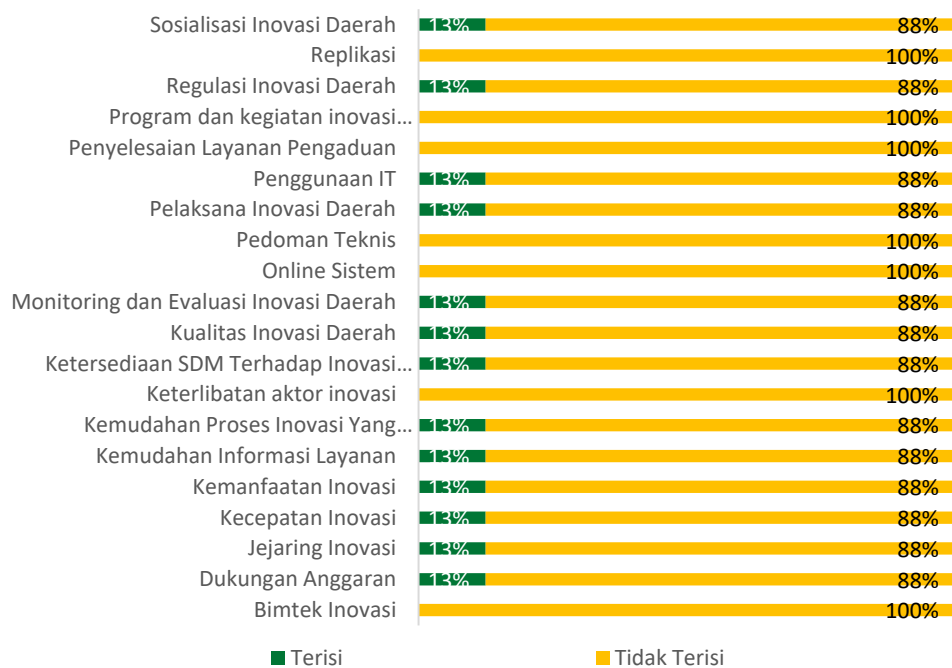
f. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Lingga

Berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebagian besar inovasi Kabupaten Lingga mencapai skor kematangan rendah sebanyak 7 inovasi (87.50%), selain itu terdapat 1 inovasi (12.50%) mencapai skor kematangan sedang.

g. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 41. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lingga

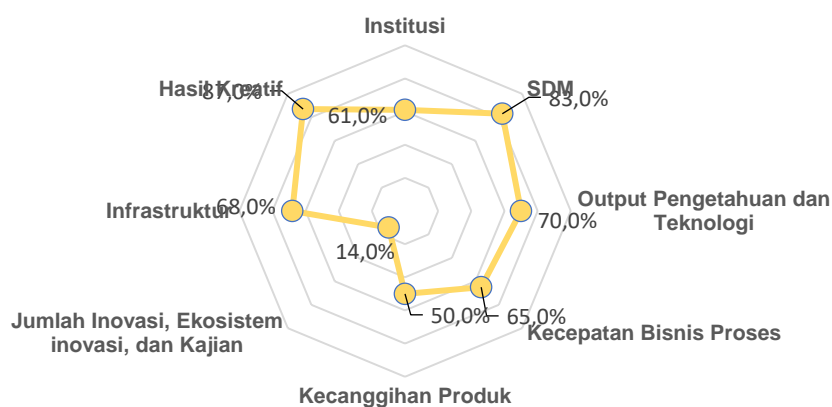
Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata – rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi sebesar 8.13%, artinya dari 8 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Lingga sebagian besar setiap inovasi telah terisi data pendukung sejumlah 2 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah. Dari seluruh indikator, 13 indikator mencapai tingkat keterisian 13% artinya dari 8 inovasi yang dilaporkan hanya 1 inovasi yang terdapat data dukung pada indikator – indikator tersebut.

h. Daftar Inovasi Kabupaten Lingga beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Lingga beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PELANDUK AKU SUKA (PELayanAN kependuDUKAn ke desA, KelUrahan, Sekolah Untuk Kartu identitas Anak)	72
Objek Wisata Siap Menyambut New Normal	0
Transportasi umum aman dari Covid-19	0
Antisipasi virus corona pada PTSP Kabupaten Lingga	0
pasar tradisional wajib masker	0
Home Stay Berstandar new normal	0
Rumah Makan Lingga patuhi protokol kesehatan	0
Minimarket new normal di masa pandemi covid-19	0

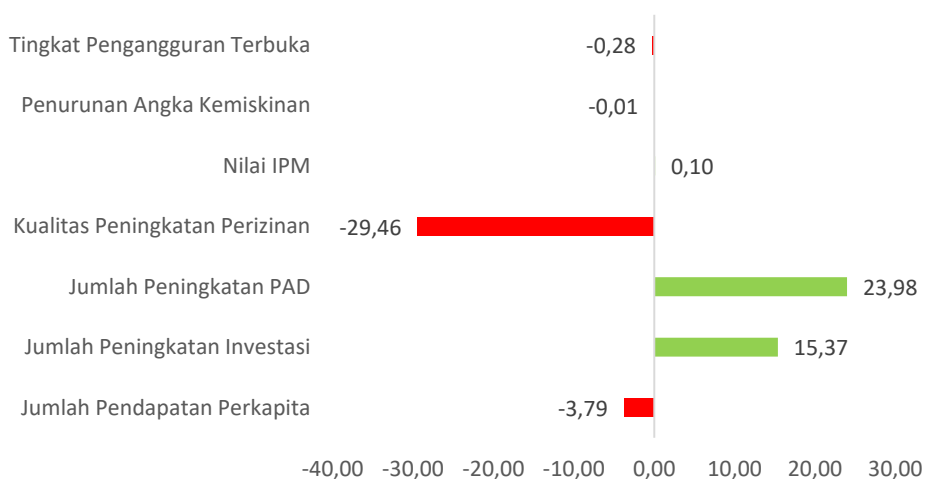
E. KABUPATEN NATUNA



Gambar 42. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Natuna memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif sebesar 87.0% artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut telah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Tetapi pada skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian masih rendah, yaitu sebesar 14.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut sebagian besar berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 43. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Natuna

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai nilai sebesar -0.28%, artinya jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Natuna pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat

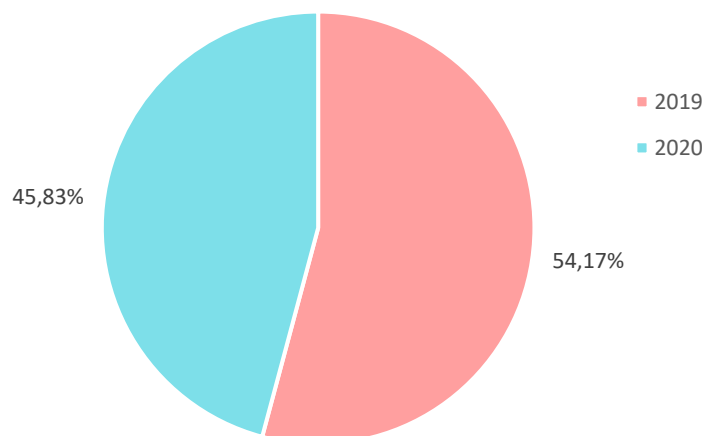
kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.01%, angka ini lebih tinggi dari standar parameter indeks yaitu penurunan sebesar 0.02%. Sedangkan dari indikator Nilai IPM, terdapat kenaikan sebesar 0.10% dari tahun sebelumnya.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten Natuna menurun sebesar 29.46% dari tahun sebelumnya, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kabupaten Natuna pada tahun 2020 meningkat sebesar 23.98% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi PAD Kabupaten Natuna lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah, yaitu kenaikan 8% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan jumlah investasi 15.37% dimana lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Natuna menurun sebesar 3.79% dari tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi dari standar parameter indeks yaitu minimal penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

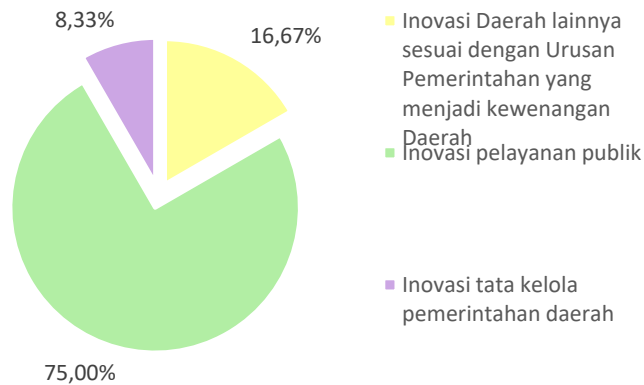
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Natuna

Berdasarkan tahun penerapannya, sebagian besar inovasi yang dilaporkan Kabupaten Natuna mulai diterapkan tahun 2019 dengan jumlah 13 inovasi (54.17%), terdapat 11 inovasi (45.83%) yang telah diterapkan sejak tahun 2020.

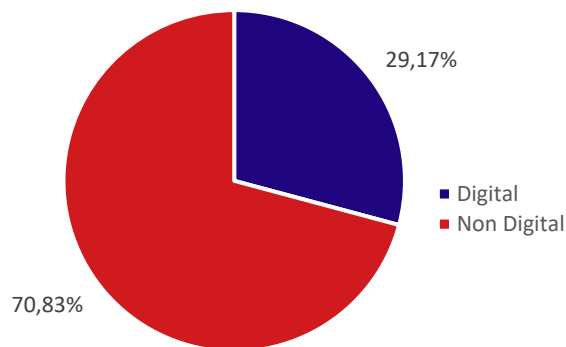
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 45. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi Kabupaten Natuna

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah Kabupaten Natuna terdiri dari inovasi berbentuk inovasi pelayanan publik dengan jumlah 18 inovasi (75.00%), sebagian lainnya merupakan inovasi berbentuk inovasi daerah lainnya sebanyak 4 inovasi (16.67%), dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 2 inovasi (8.33%).

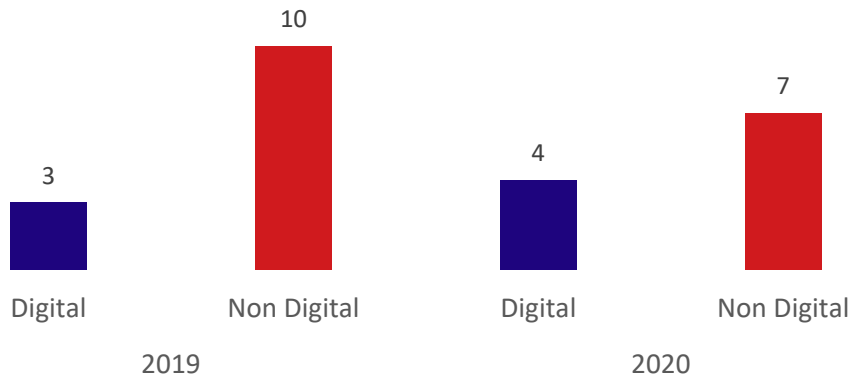
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Natuna

Dilihat dari jenis inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kabupaten Natuna merupakan inovasi non digital sebanyak 17 inovasi (70.83%), sedangkan terdapat 7 inovasi (29.17%) berbentuk digital.

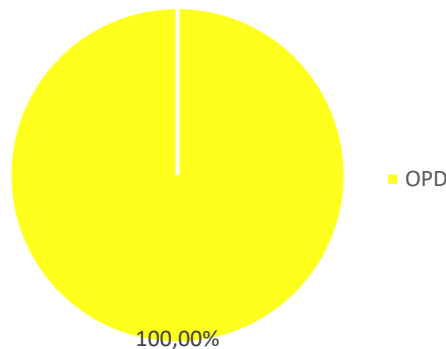
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 47. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Natuna

Berdasarkan tahun penerapan dan jenis inovasi, terdapat kenaikan pada jenis inovasi digital, terdapat kenaikan dari 3 inovasi pada tahun 2019 menjadi 4 inovasi pada tahun 2020, sedangkan jenis inovasi non digital terdapat kenaikan dari 10 inovasi pada tahun 2019 menjadi 7 inovasi pada tahun 2020.

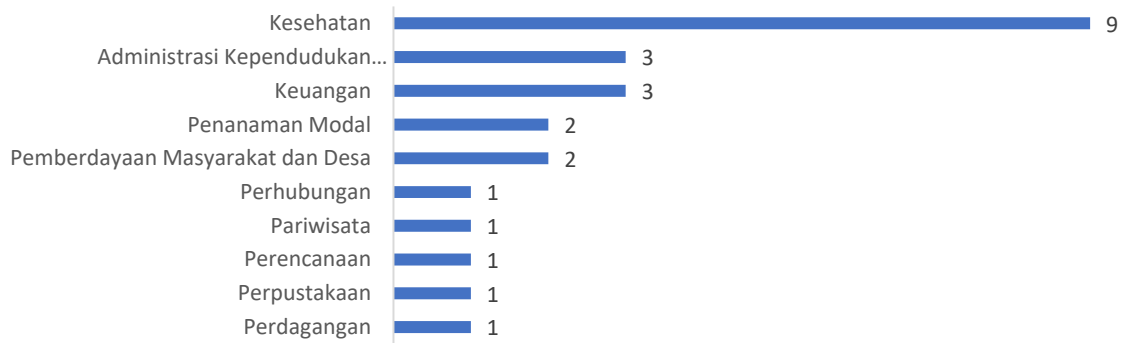
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi Kabupaten Natuna

Berdasarkan kategori inisiator, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Natuna berasal dari inisiasi OPD sebanyak 24 inovasi (100.00%).

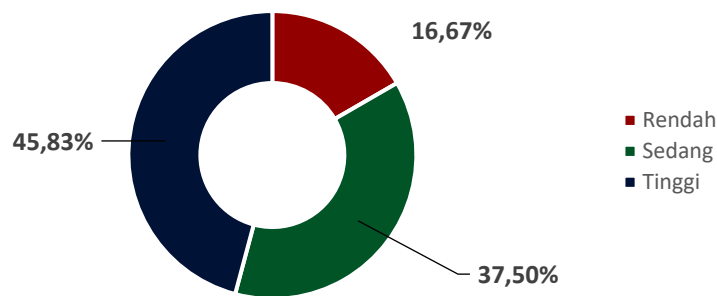
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 49. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi dari urusan Kesehatan merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak sejumlah 9 inovasi.

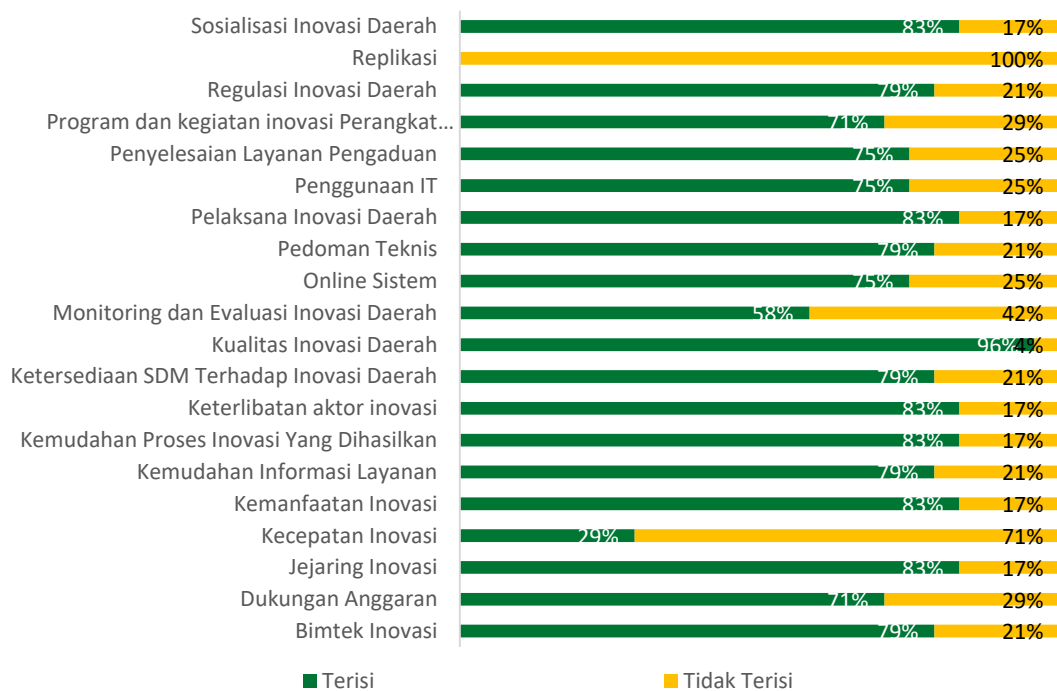
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kabupaten Natuna

Berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebagian besar inovasi Kabupaten Natuna telah mencapai skor kematangan tinggi sebanyak 11 inovasi (45.83%), selain itu terdapat 9 inovasi (37.50%) mencapai skor kematangan sedang dan 4 inovasi (16.67%) mendapat skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

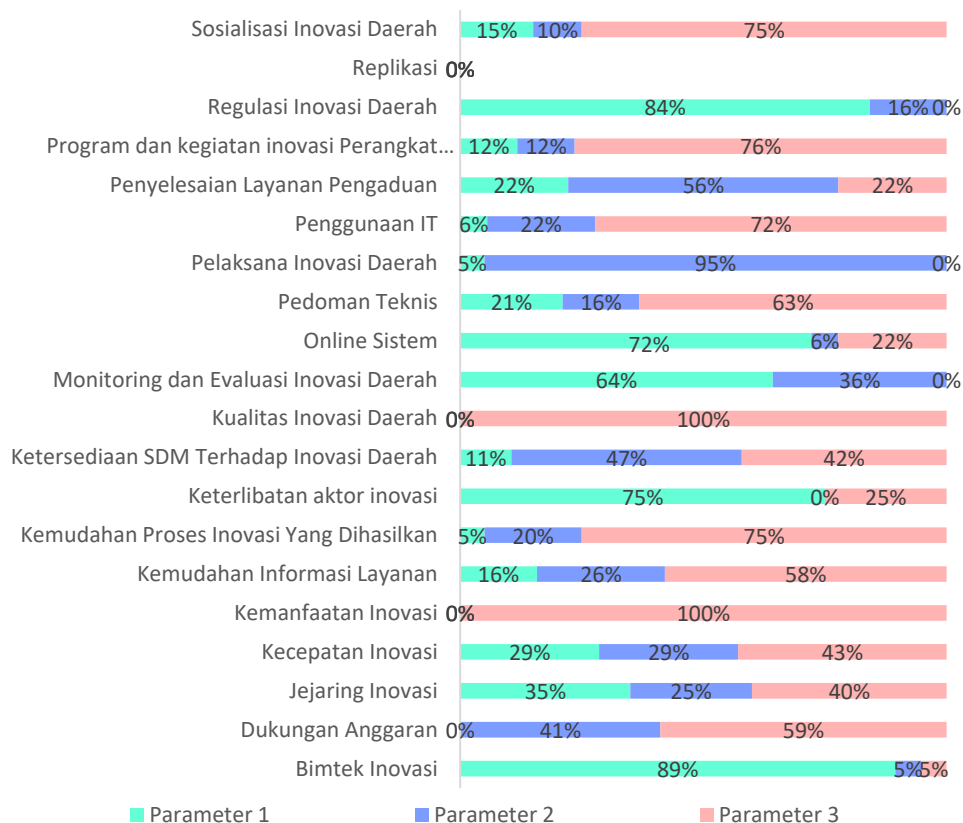


Gambar 51. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata – rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi sebesar 72.29%, artinya dari 24 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Natuna sebagian besar setiap inovasi telah terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 96%, artinya dari 24 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Natuna terdapat 22 inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator Replikasi memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung sebesar 0% artinya dari semua inovasi yang dilaporkan, tidak terdapat terdapat data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 52. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi. Pada indikator tersebut, 100% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Natuna telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter 3.

Indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 95% artinya dari seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung, seluruhnya termasuk dalam kategori parameter 2.

Pada indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 89%, seluruh dari inovasi yang telah terisi data pendukung hanya memenuhi parameter pertama dalam indikator tersebut.

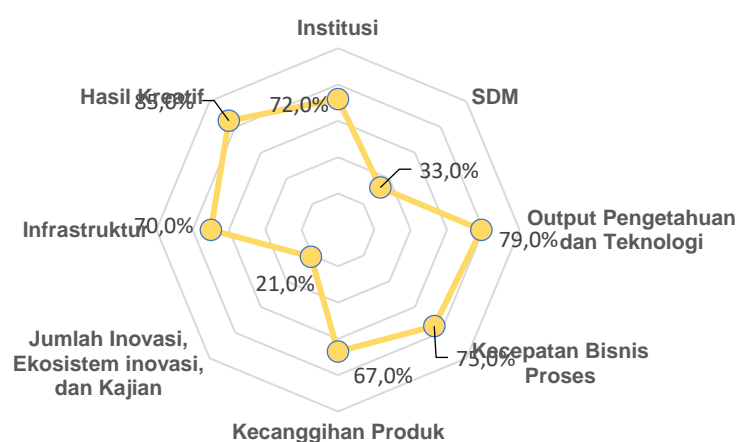
j. Daftar Inovasi Kabupaten Natuna beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Natuna beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SI MANIS NATUNA (Siaga Penyakit Kronis di Natuna Ujung Utara Indonesia)	127
SIKEKAH (Sistem Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah)	112
ePusda Natuna (Natuna Digital Library)	111
SISTEM INFORMASI KABUPATEN NATUNA SEHAT	106

Nama Inovasi	Skor Kematangan
#LAWA CORONA NINTEN (Layanan Whatsapp Comunitas Orang Natuna) 19 Jenis Pelayanan	106
STMJ (Salam Tiga Puluh Menit Jadi)	104
TELANTAR (Terlambat Layanan Diantar)	104
SELINAH (Konseling Pra Nikah)	104
GELI RESTI (Gerakan Peduli Ibu Hamil Resiko Tinggi)	103
SIJEMPOL BAYAN (Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman)	103
LAMPU PELITA TERANG LAGI (Layanan Antar Jemput Pasien Persalinan, Akta dan Surat Keterangan Tidak Urus Lagi)	102
KEPAK SANTRI (Kelas Bapak Sayang Anak dan Istri)	99
GETA MAKELAR (Gerakan Tanam dan Makan Daun Kelor, Agar ASI Lancar)	99
RESI POSKILAT (Skrining dan Edukasi Hipertensi di Posbindu Keliling RT)	97
PESONA GELAS NATUNA (Peduli Persoalan Kesehatan Hari Tua Nanti dengan Gerakan Lansia Sehat di Natuna)	94
POINT OF SALES (POS)	85
GEDORABUBA (Gerakan Donor Darah Bunguran Batubi)	81
PENGEMBANGAN CABE SMART	75
PEMBAYARAN PBB P2 ONLINE	71
KASAM (Kelompok Asistensi Masyarakat)	57
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pariwisata	15

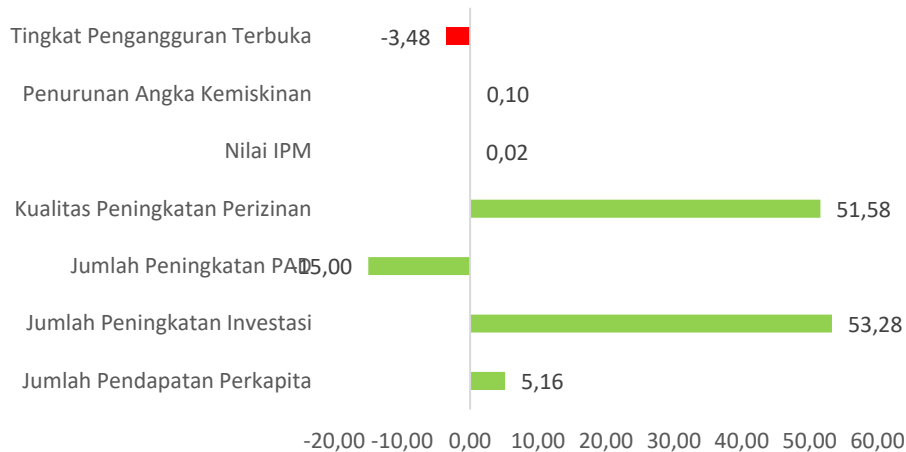
F. KOTA BATAM



Gambar 53. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Batam

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Batam memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Tekonolgi, yaitu 79.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecepatan Bisnis Proses sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yaitu 21.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



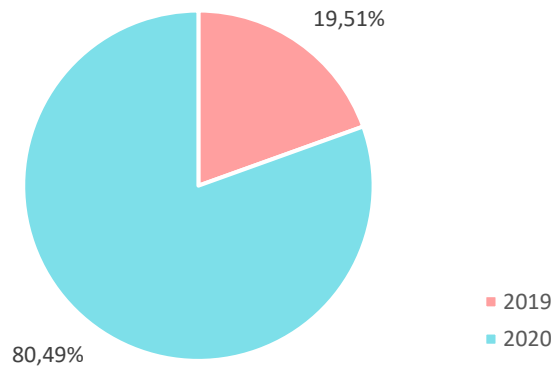
Gambar 54. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batam

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batam belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,48%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 3,48%, hal ini belum sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Begitu pula untuk Indikator Jumlah Peningkatan PAD yang juga mengalami penurunan sebesar 15,00% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%.

Beberapa indikator mengalami peningkatan diantaranya indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0,10%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,02% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 51,58% dimana nilai tersebut juga telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 53,28% dimana nilai tersebut sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,16%, nilai tersebut telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

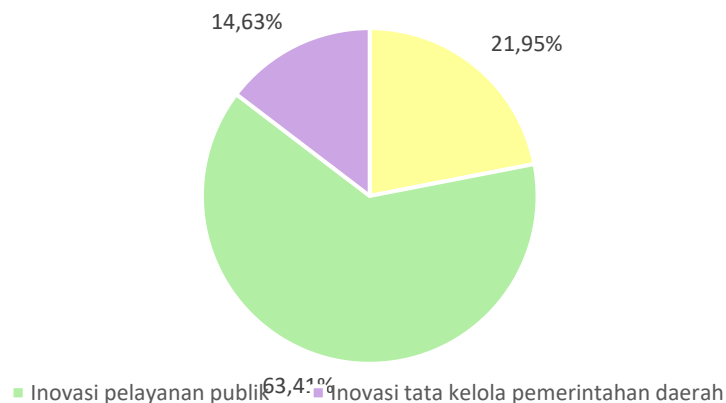
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Batam

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batam telah diterapkan sejak tahun 2020 yaitu sebanyak 33 (80,49%) inovasi dari 41 inovasi yang dilaporkan dan 8 (19,51%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

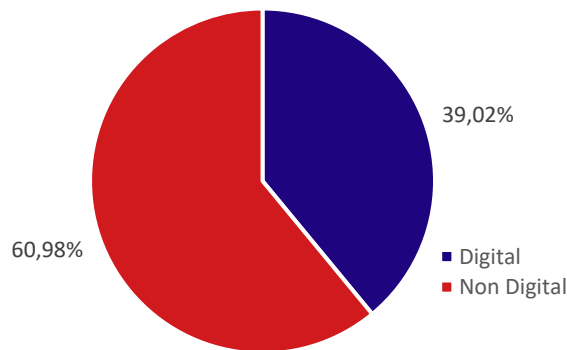
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 56. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Batam

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batam didominasi oleh inovasi pelayanan publik sebanyak 26 (63,41%) inovasi dari 41 inovasi yang dilaporkan. Sisanya yaitu inovasi berupa daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 9 (21,95%) inovasi dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 6 (14,63%) inovasi.

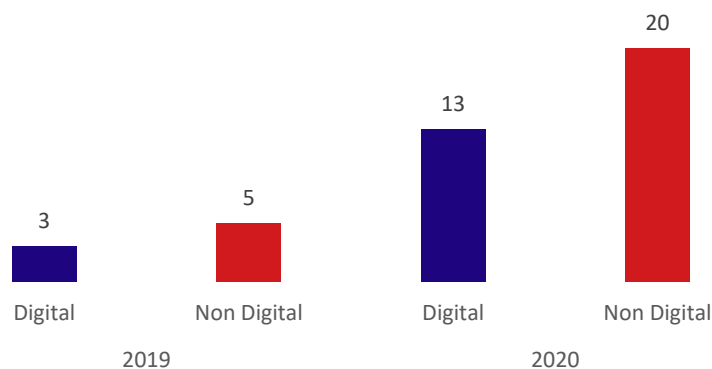
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Batam

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebanyak masing-masing 25 (60,98%) inovasi dari 41 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Batam merupakan inovasi non digital, sebanyak 16 (39,02%) sisanya merupakan inovasi digital.

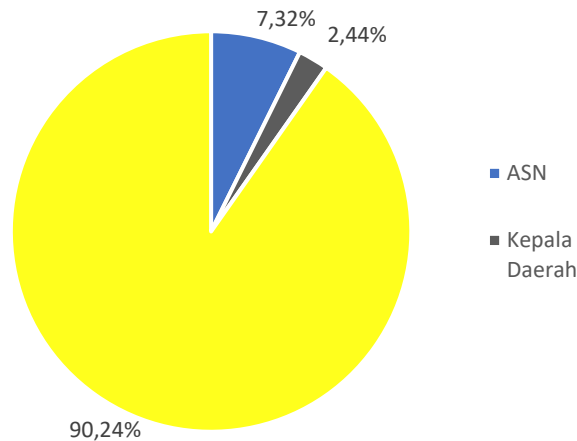
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 58. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Batam

Secara umum jumlah inovasi di Kota Batam mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 baik untuk inovasi digital maupun inovasi non digital. Sebanyak 3 inovasi digital telah diterapkan pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi 13 inovasi. Inovasi non digital mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 5 inovasi dan pada tahun 2020 naik menjadi 20 inovasi.

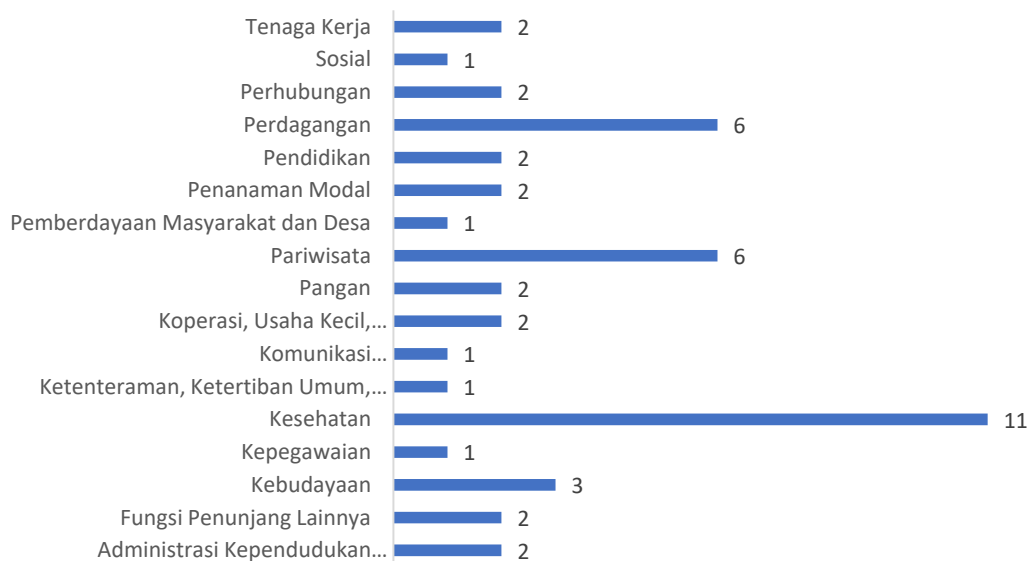
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Batam

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Batam pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD), yaitu sejumlah 37 (90,24%) inovasi dari 41 inovasi yang dilaporkan. Sebanyak 3 (7,32%) inovasi berupa inovasi yang diinisiasi oleh ASN, dan sisanya sebanyak 1 (2,44%) diinisiasi oleh Kepala Daerah.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



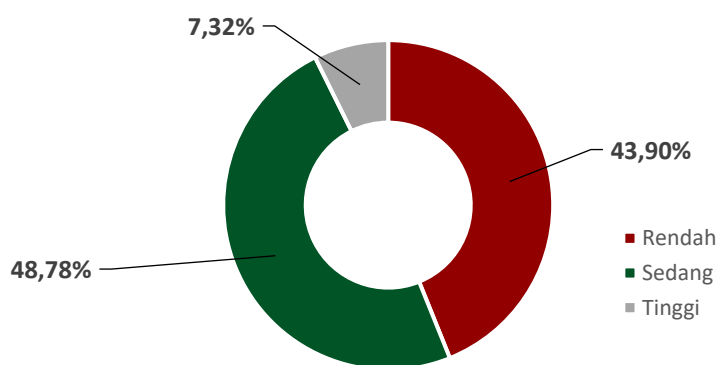
Gambar 60. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Batam

Sebaran inovasi daerah pada Kota Batam berdasarkan urusan pemerintahan terlihat fluktuatif. Di mana Urusan Bidang Kesehatan menjadi inovasi yang paling banyak diterapkan yaitu sebanyak 11 inovasi. Beberapa Inovasi yang paling sedikit diterapkan yaitu inovasi Urusan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komunikasi,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Kepegawaian dengan masing-masing sebanyak 1 inovasi.

Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat urusan wajib pelayanan dasar diantaranya inovasi bidang sosial sebanyak 1 inovasi, urusan bidang pendidikan sebanyak 2 inovasi, urusan bidang pekerjaan umum sebanyak 5 inovasi, urusan bidang ketentraman, ketertiban umum sebanyak 1 inovasi dan urusan bidang kesehatan sebanyak 11 inovasi .

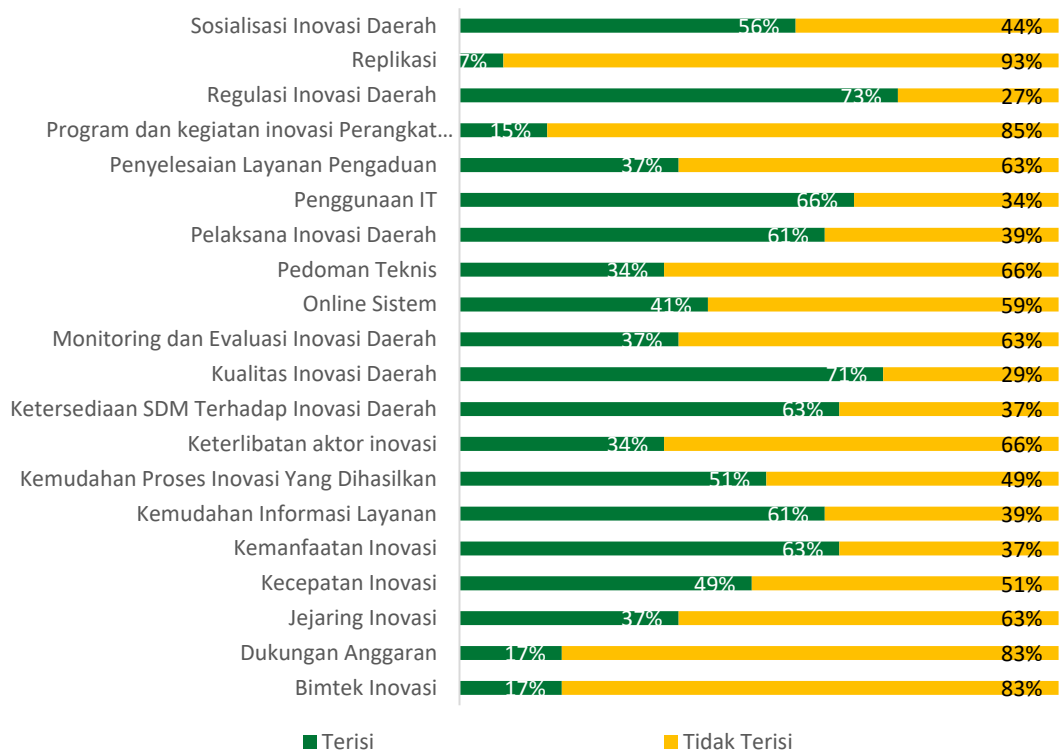
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Batam

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, secara umum inovasi di Kota Batam baru mencapai skor kematangan sedang yaitu sebesar 48,78%. Sisanya sebesar 7,32% sudah mencapai skor kematangan tinggi dan sebesar 43,90% masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

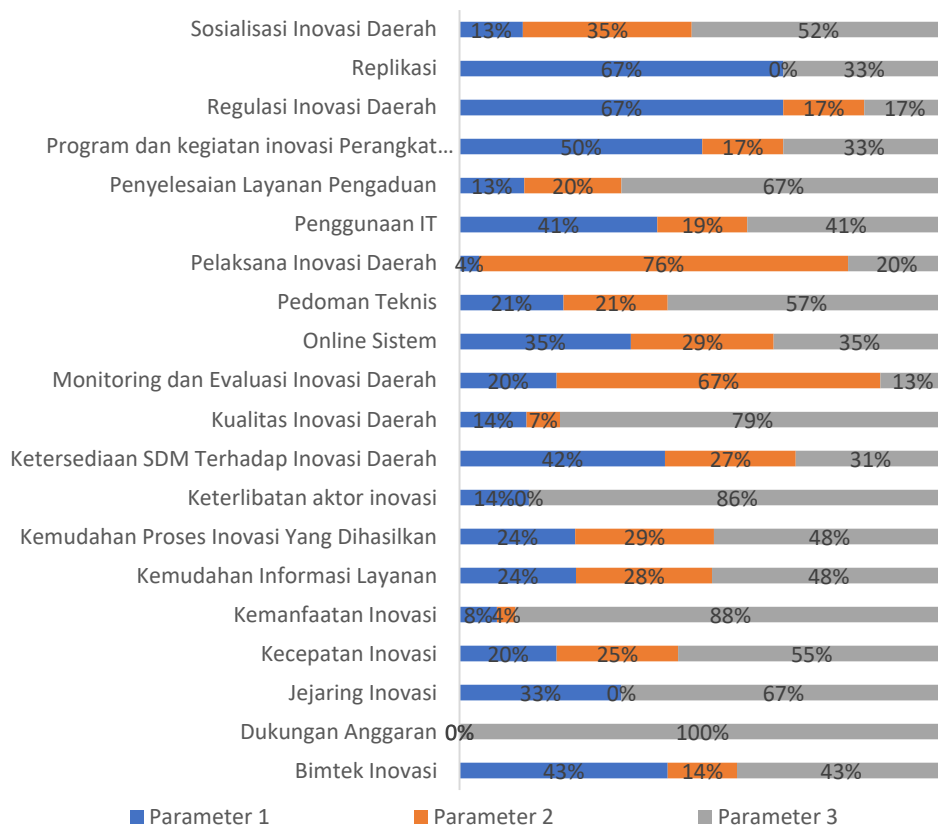
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 62. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Batam

Dari 41 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batam, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 55,49% sedangkan 44,51% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi yaitu sebesar 73%, artinya 73% dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batam telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling kecil sebesar 7% adalah indikator Replikasi, artinya 7% dari inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 63. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya semua inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 76% artinya 76% dari inovasi telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Regulasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya 67% dari inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk Replikasi dan Regulasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Bintan beserta Skor Kematangannya

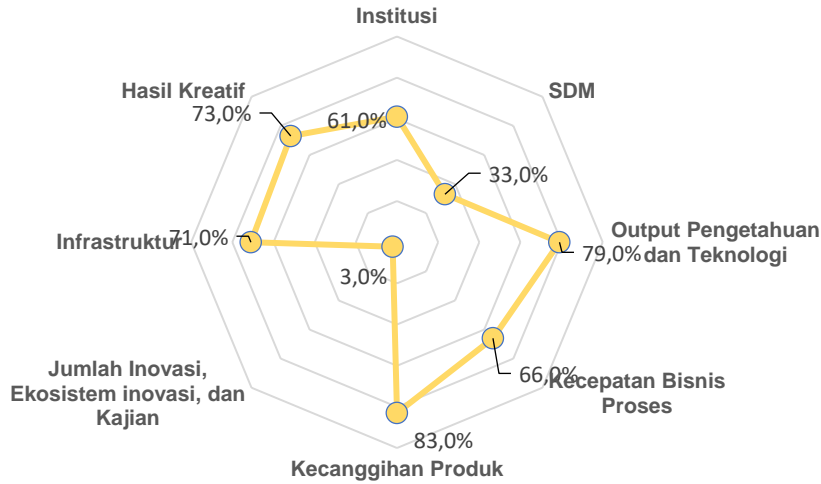
Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Bintan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Tatanan Kehidupan Normal Baru Perizinan di PTSP Kota Batam	0
Tatanan Kehidupan Baru Hotel Bebas Covid-19 Kota Batam	0
Tatanan Kehidupan Baru Restoran Bebas Covid-19 Kota Batam	0
Tatanan Kehidupan Normal Baru Pasar Modern/Mall bebas Covid-	0

19 Kota Batam	
Tatanan Kehidupan Baru Destinasi Wisata Golf bebas Covid-19 Kota Batam	0
Tatanan Kehidupan Normal Baru Transportasi Umum Bebas Covid-19 Kota Batam	0
Tatanan Kehidupan baru Pasar Tradisional Bebas Covid 19 Kota Batam	0
Apekesah	77
Pasar TPID Kota Batam	27
Aplikasi Pasar Mama	4
Himbauan Tidak Panic Buying (Berbelanja dalam partai besar) kepada Masyarakat, Tidak Memainkan Harga dan Tidak Menumpuk Barang bagi Distributor/ Pengusaha Pangan dan Alat Kesehatan	21
Pendaftaran Pasien menggunakan sistem antrian online via Whatsapp (WA)	0
Support Center Kominfo	101
"PONJEN" Pola Jitu Pemberdayaan Nelayan di Kota Batam	98
Patroli Pengawasan Covid-19	30
SIPANDU COVID-19	68
SIMPEG: Presensi Berbasis Posisi	86
SIP BOS	108
Kenaikan Gaji Berkala Online	84
DIRUMAH SAJA	86
LURING SEHAT DARING SEKOLAH	98
Pelayanan Online Disdukcapilbisa Kota Batam	81
DUTA CHSE	90
Kenduri Seni Melayu	68
KERJASAMA DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN WIRUSAHA DAN PRODUKTIVITAS	0
Pelayanan Publik Berbasis Online dalam Pembuatan Kartu AK/1 (Kartu Pencari Kerja)	0
MISS IVA BATU AMPAR	0
SIMDALIR OK	81
Penerapan Prokes Pasar Tradisional Bebas Covid-19 Kota Batam	119
Roadshow Germas UPT Puskesmas Sungai Panas	13
Pelayanan Keliling (Jemput Bola) Perekaman dan Pencetakan KTP-el	78
Puskesmas Keliling (Pusling) Lansia UPT Puskesmas Sungai Panas	19
Inovasi Intranet UPT Puskesmas Sungai Panas	62
Batik Batam Fashion Week	79
DATUK SIMUDA	56
DERMAWAN SEHATI (KADER PEMBINA WARGA JAMBAN SEHAT TIBAN LAMA)	74
Kios Mobile	62
Aplikasi Bakulan	57
Pembayaran Non Tunai pada UPT Pusat Kesehatan Hewan	58

Etiketting QRIS Trans Batam	62
CENTINI (Cegah Stunting Sejak Dini)	47

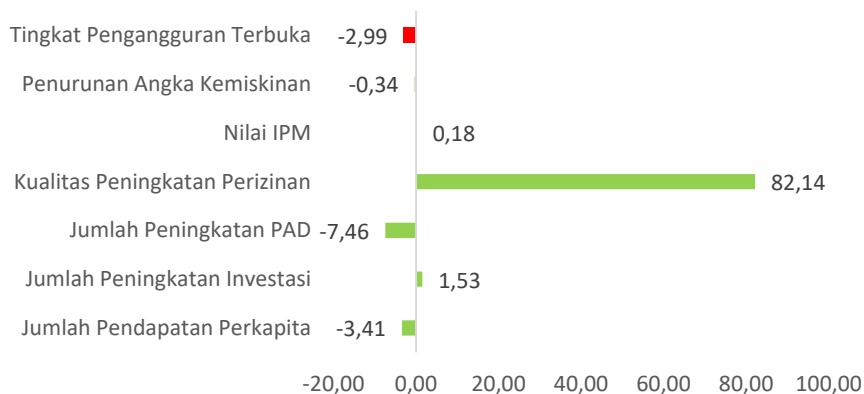
G. KOTA TANJUNG PINANG



Gambar 64. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tanjung Pinang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Tanjung Pinang memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Tekonolgi, yaitu 79,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecepatan Bisnis Proses sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih rendah, yaitu 3,0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 65. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tanjung Pinang

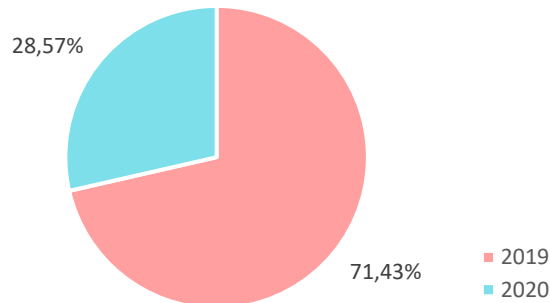
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tanjung Pinang belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,99%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik 2,99%, hal ini belum sesuai dengan standart parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan turun sebesar 0,34%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD juga mengalami penurunan sebesar 7,46% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Begitu pula untuk indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan yaitu sebesar 3,41%, nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

Beberapa indikator mengalami peningkatan diantaranya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,18% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 82,14% dimana nilai tersebut juga telah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian pula untuk indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,53% dimana nilai tersebut sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

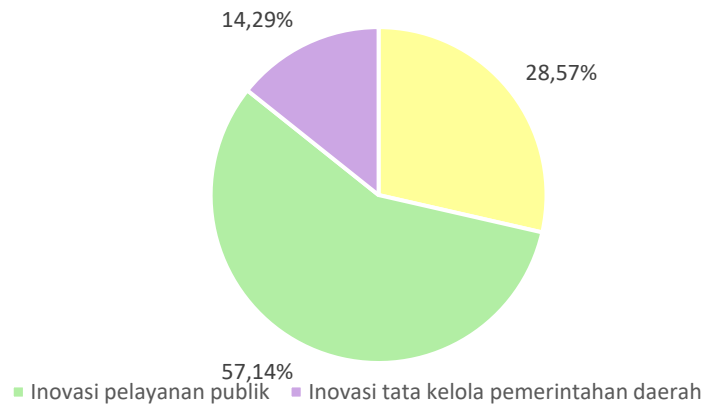
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi di Kota Tanjung Pinang dilaporkan sejak tahun 2019 yaitu sebesar 5 (71,43%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan. Sedangkan sisanya sebanyak 2 (28,57%) inovasi dilaporkan pada tahun 2020.

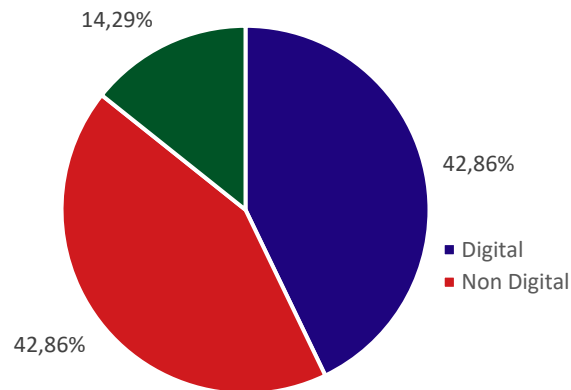
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 67. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tanjung Pinang didominasi oleh inovasi pelayanan publik sebanyak 4 (57,14%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan. Sisanya yaitu inovasi berupa inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 2 (28,57%) inovasi dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 1 (14,29%) inovasi.

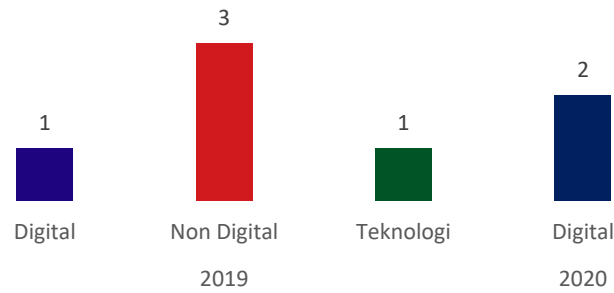
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebanyak masing-masing 3 (42,86%) inovasi dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Tanjung Pinang merupakan inovasi digital dan inovasi non digital, kemudian 1 (14,29%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

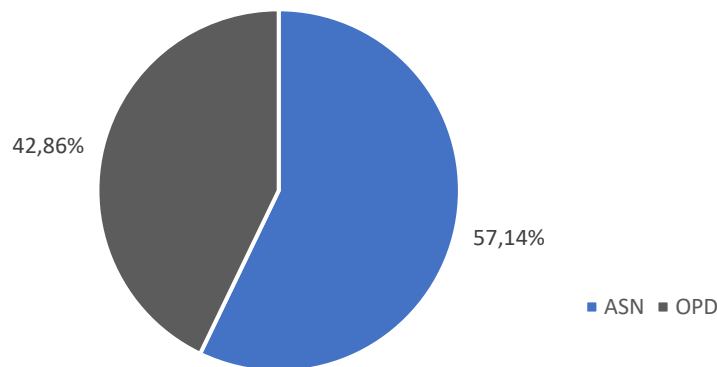
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 69. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tanjung Pinang

Secara umum jumlah inovasi digital Kota Tanjung Pinang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu terutama untuk inovasi non digital dan teknologi. Inovasi non digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi dan pada tahun 2020 tidak ada inovasi yang dilaporkan. Begitu pula dengan inovasi teknologi yang juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 terdapat 1 inovasi yang diterapkan dan pada tahun 2020 tidak ada inovasi yang diterapkan. Namun demikian, inovasi digital mengalami peningkatan di mana sebanyak 1 inovasi telah diterapkan pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi 2 inovasi.

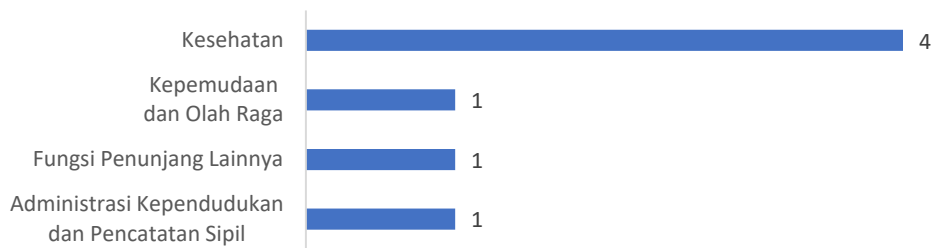
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Tanjung Pinang

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Tanjung Pinang pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 4 (57,14%) inovasi, sementara 3 (41,86%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Perangkat Daerah (OPD).

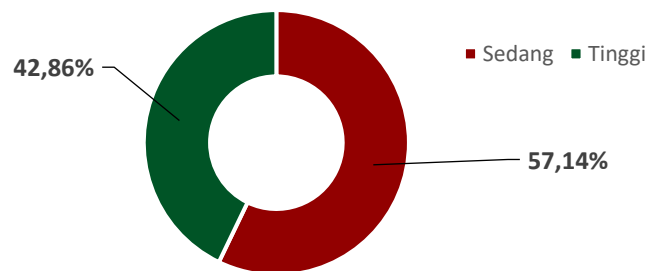
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 71. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Tanjung Pinang

Sebaran inovasi daerah pada Kota Tanjung Pinang berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata kecuali untuk urusan bidang kesehatan yang mendominasi yaitu sebanyak 4 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 4 inovasi yang sekaligus menjadi urusan inovasi yang terbanyak, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

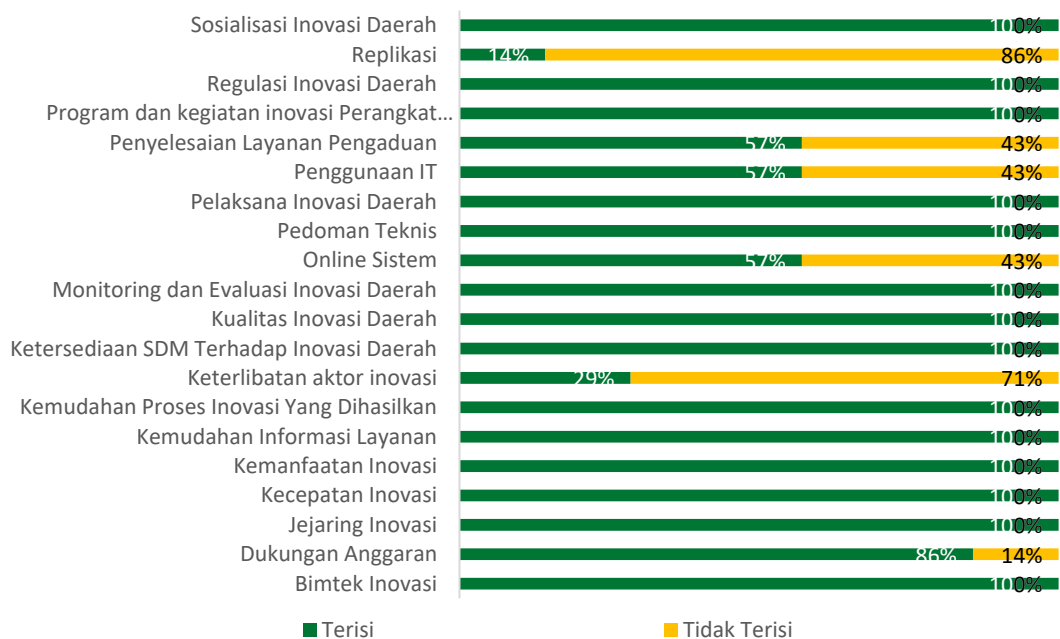
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tanjung Pinang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, secara umum inovasi di Kota Tanjung Pinang mencapai skor kematangan sedang yaitu sebesar 4 (57,14%) inovasi. Sebesar 3 (42,86%) sisanya mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

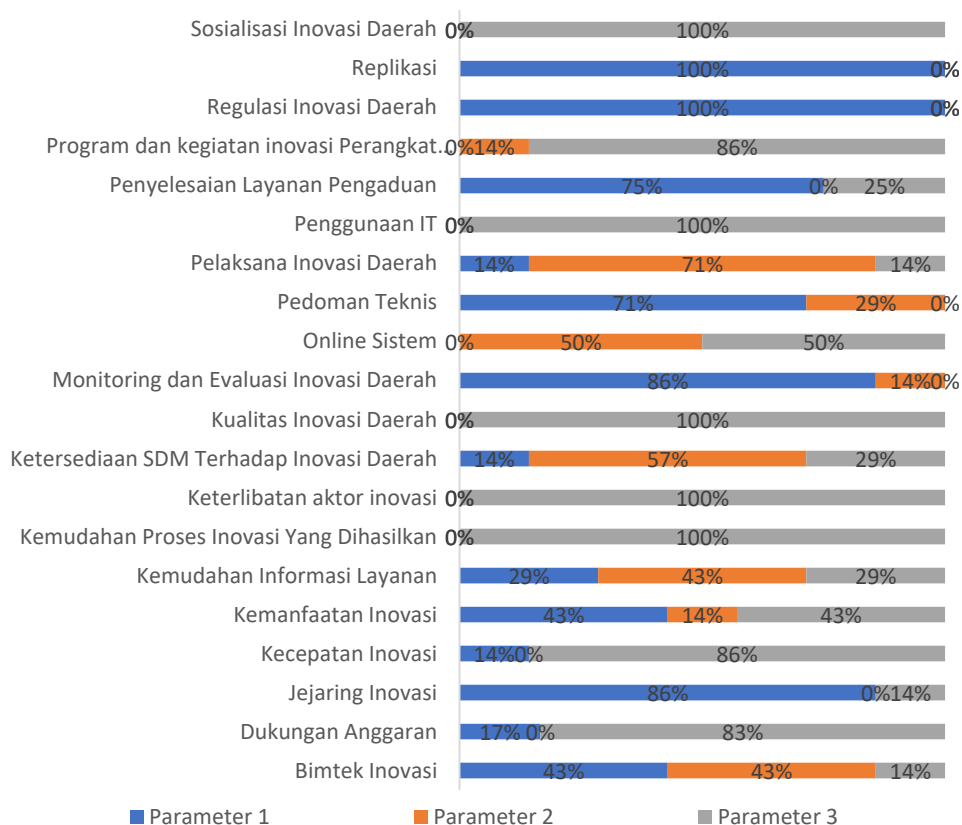


Gambar 73. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tanjung Pinang

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tanjung Pinang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 15,00% sedangkan 85,00% lainnya telah terisi data pendukung. Beberapa indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung mencapai 100% yaitu indikator sosialisasi, regulasi, program dan kegiatan, pelaksana inovasi, pedoman teknis, monitoring dan evaluasi, kualitas inovasi, ketersediaan SDM, kemudahan proses inovasi, kemudahan informasi, kemanfaatan, kecepatan inovasi, jejaring inovasi, dan bimtek, artinya semua inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 14% artinya hanya 1 dari 7 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 74. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator sosialisasi, penggunaan IT, kualitas inovasi, keterlibatan aktor, dan kemudahan proses inovasi yang dihasilkan yaitu masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator pelaksana inovasi daerah sebesar 71% artinya 71% dari inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator replikasi dan regulasi inovasi daerah masing-masing sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kota Tanjung Pinang beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kota Tanjung Pinang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sistem Manajemen Kelurahan	91
Posyandu Remaja FRESH (FORUM REMAJA SEHAT)	86
Penyukuto (penyuluhan dan konsultasi akupresur dan toga)	85
MAMA MUDA (MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT [MTBS])	85

TERINTEGRASI DENGAN ASUHAN MANDIRI AKUPRESUR & MASSAGE BABY) [Dalam Gedung]	
E-Puskesmas	107
VIRTUAL RIDE AND RUN	115
Si-CEPAT (Sistem Informasi CSR untuk Percepatan Pembangunan Kota Tanjungpinang)	104

The Page Left is Blank



BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Kepulauan Riau terdapat 7 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 50,90 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Tanjung Pinang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 49,05 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Natuna melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. Kota Batam

Kota Batam memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 37,33 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Batam melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 36,95 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kepulauan Anambas melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 35,80 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bintan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 32,09 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kepulauan Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Karimun melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 19,64 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Lingga melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.